

PERTEMUAN 2 BATASAN

RUANG DARATAN :

Ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan daratan (termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah).

RUANG LAUTAN :

Ruang yang terletak diatas dan dibawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya.

WILAYAH PESISIR :

Daerah Peralihan Antara Ekosistem Darat dan Laut yang Dipengaruhi oleh Perubahan di Darat dan Laut

BATASAN

GARIS PANTAI :

Batas Pertemuan antara Bagian Laut dan Daratan Pada Saat Terjadi Air Laut Pasang Tertinggi.

GARIS SEMPADAN (GSP) :

Jarak Bebas atau Batas Wilayah Pantai yang tidak Boleh dimanfaatkan untuk Lahan Budidaya atau untuk didirikan Bangunan. GSP diukur dari Titik Pasang Tertinggi.

SEMPADAN PANTAI :

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

PASANG SURUT :

Gelombang yang dibangkitkan oleh adanya Interaksi antara Laut, Matahari dan Bulan.

PENGERTIAN WILAYAH

Wilayah yang batas & sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif = wilayah pemerintahan

w.nas : penetapan norma & kriteria, pedoman terpadu, 25 th

w.dt.I : arahan, pedoman terpadu, 15 th

w.dt.II: perumusan, pengelolaan, pelaksanaan, 10 th

Wilayah yang batas & sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional = kawasan kawasan dgn fungsi utama:

1. lindung,
2. budi daya

kawasan:

1. k.perdesaan (permukiman, b.d.pertanian),
2. k.perkotaan (permukiman, b.d.npn pertanian, pusat),
3. k.tertentu (strategis, prioritas)

KONSEP WILAYAH

fisik : metafisik

Fisik:

Wilayah = daerah

Wilayah = luar kota

Wilayah = tempat, memiliki batas fisik atau ukuran tertentu

=, atau > kota

Meta fisik:

Wilayah = konsep lokalitas suatu tempat

Wilayah = daerah yang dikuasai

Batas bersifat konseptual

KONSEP WILAYAH

Wilayah = Unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya saling tergantung secara internal.

Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis:

- Wilayah Homogen
- Wilayah Nodal
- Wilayah Administratif
- Wilayah Perencanaan

KONSEP WILAYAH

- Wilayah Homogen (homogenous region)

- Mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.
- Contoh: Ekonomi (struktur produksi dan konsumsi, miskin), geografi (topografi, iklim), agama, suku, dll.
- Richardson 1975, Hoover 1977: wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (internal uniformity)
 - Wilayah Nodal
(nodal region, metropolitan region)
- Secara fungsional mempunyai ketergantungan antara Pusat/inti dan daerah belakangnya (hinterland).
 - Metropolitan.
- Arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, komunikasi dan transportasi.
- Batas wilayah ditentukan sejauh mana pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya.
- Sukirno 1976: w.n. = ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
- Hoover 1977: struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan sebagai sel hidup atau suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma (periferi) yang saling melengkapi.
 - Integrasi fungsional merupakan dasar hubunganketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu.
- Wilayah Administratif (administrative region)
 - Batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik.
 - Propinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, RW, RT.
 - Sukirno 1976: di dalam praktek, apabila membahas mengenai pembangunan wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan.
 1. pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana perlu tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah lebih praktis.
 2. dasar pengumpulan data selama ini didasarkan kepada wilayah administratif.
- Wilayah Perencanaan (1)
(= planning region, programming region, functional region)
 - Bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga aspek ekologis DAS..

– Boudeville (dlm Glasson 1978): planning region/ programming region

- wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.
- Cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja.
- Cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

• Wilayah Perencanaan (2)

– Klaessen (dml Glasson 1978): = harus mempunyai ciri-ciri :

- Cukup besar utk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi.
- Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga lkerja yang ada.
- Mempunyai struktur ekonomi yang homogen.
- Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point)
- Menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan.
- Masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran terhadap persoalan-persoalannya.

REGION

- Area di muka bumi yg ditandai oleh suatu properti tertentu
- Memiliki keseragaman karakter atau tingkat interaksi
- Basis pembagian unit geografis yang lebih luas (dunia, benua, bangsa, negara)
- Mengintegrasikan, mensintesis berbagai tipe informasi utk menghasilkan pengertian lebih lengkap mengenai suatu tempat

Harrington: formal region (memiliki homogenitas), functional region (terfokus pada suatu pusat tertentu), vernacular region (abstrak, ada dalam benak manusia)

REGIONALISASI

- w. administratif, w. homogen, w. nodal, w. perencanaan
- RTRW, zoning atau peruntukan

REGIONALISME

Berg: bioregion: geographical terrain & terrain of consciousness

REGION

- Regio = “area” atau “environment”
- Beragam konotasi dan dimensi
- Sukar ditentukan batas-batasnya
- Dapat mengacu pada sub-unit dalam negara (c: kabupaten, propinsi, Iramasuka, Indonesia Timur) atau kelompok negara dalam pengertian geografikal, politikal atau ekonomikal (c: Uni Eropa, ASEAN)
- Kriteria utama untuk mendefinisikan region adalah geografikal, ekonomik, budaya, etnik, kota atau administratif.

There's an interesting set of meanings hidden in the word region. It's connected to the word for king: Latin, rego, and Greek, orego; region, if the king owned it. We know the king lives in a palace but the region is not the palace.

- bukan wujud fisik bangunannya
- Konsep tempat (ecosystem) yang dikuasai secara formal (anthroposystem) = suatu tempat berdasarkan sistem alam + kemanusiaan

BIOGEOGRAPHY

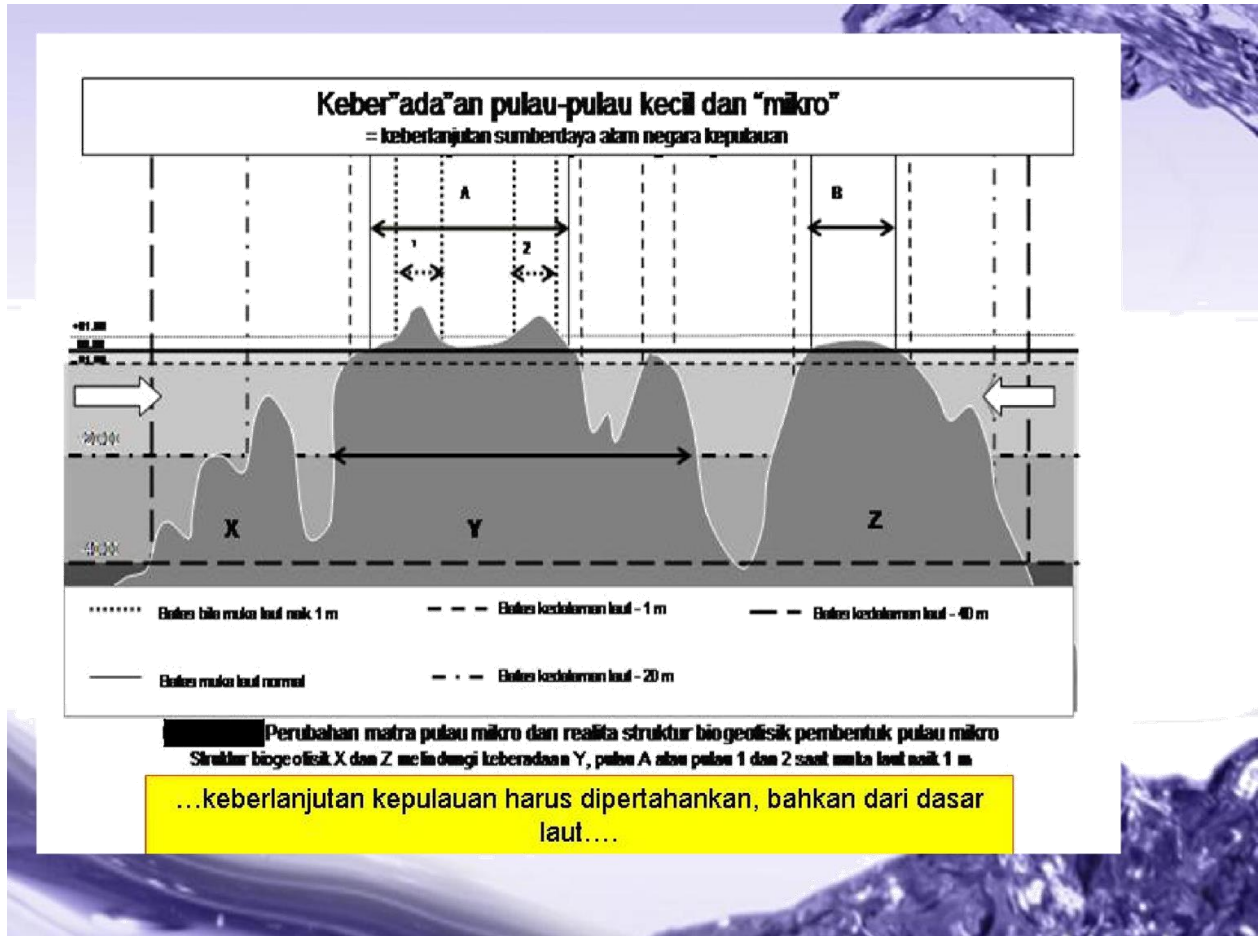
Biogeography has come up with the biotic provinces and biogeographical provinces that can be used as hard data. Quantified biogeography is late in the development of science. Buried in the International Union for the Conservation of Nature and Natural resources in Switzerland, the work of Raymond F. Dasmann attempts to divide up the planet into life zones and biotic provinces, what he describes as "a planetary-scale mapping of biotic provinces within which similar ecological conditions prevail and between which there are marked differences of plant and animal species and vegetation (plant structure — savanna, rainforest, etc.)."

Together with Miklos D.F. Udvardy Dasmann produced a world map of biogeographical provinces which is a way of locating yourself on the planet rather than in the world.

BIOREGION

Region yang tidak memiliki batas yang keras atau jelas, tetapi diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri alami sesuai kultur permukimnya, yang dapat diidentifikasi berdasarkan geographic terrain (geografis), terrain of consciousness (kesadaran kultural).

Region yang diidentifikasi berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan lokal



PERTEMUAN 3

Ruang

- Domain Ruang (space), bukan ruang (room)
- Ruang: Meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumberdaya yang terkandung di dalamnya.
- Ruang Publik (Public/commons' spaces)
- Ruang Non Publik: sepanjang menyangkut kepentingan publik
- Unit-unit ruang di daratan, laut dan udara adalah unit wilayah
- Ruang = Tempat Kehidupan

Secara geofisik: Sebagai tempat kehidupan (Biosphere):

Tempat Kehidupan Alamiah geosphere (permukaan kulit bumi hingga kedalaman ± 3 m dalam tanah dan ± 200 m dpl)

atmosphere (hingga kira-kira 30 m diatas permukaan tanah).

Tempat Kehidupan yang dibatasi Teknologi Manusia

Batas Ruang dimana teknologi manusia mampu menjangkau/ mengakses/ mengeksplorasi batas terbawah geosphere dan batas atmosphere/luar

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara Ruang sebagai Sumberdaya

Common Pool resources: sumberdaya yang dimiliki umum/seluruh stakeholders Jika tidak diatur Tragedy of The Commons (Hardin, 1969)/ fenomena open access: dieksploitasi habis-habisan tanpa satu pihakpun memiliki insentif memeliharanya sehingga mengalami degradasi/kerusakan

Ruang

- Wadah: Tempat di mana sumber daya dan kehidupan berada
- Sumberdaya: Memiliki karakteristik (sifat-sifat) sumberdaya. Merupakan sesuatu yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dan 2 sifat syarat sumberdaya yang terpenuhi: (1)

Konsep Wilayah

Berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “wilayah”, “kawasan”, “daerah”, “regional”, “area”, “ruang”, dan istilah-istilah sejenis, banyak dipergunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya walaupun masing-masing memiliki penekanan pemahaman yang berbeda-beda.

Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang menyebabkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan

Definisi menurut Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

- “Wilayah”: adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
- “Kawasan”: adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
- Daerah: umumnya dipahami sebagai unit wilayah berdasarkan aspek administratif. (UU 32/2004; Daerah (Daerah otonom): ...kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
- Kawasan: adanya penekanan fungsional suatu unit wilayah, yakni adanya karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Pengertian Teoritik

Secara teoritik tidak ada perbedaan nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya secara umum dapat diistilahkan dengan istilah yang lebih umum, yaitu wilayah (region). Setiap kawasan atau sub kawasan memiliki fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut

Contoh Beberapa Definisi Teoritik

- Murty (2000): Wilayah adalah suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik (kabupaten), dan perdesaan.
- Isard (1975): Wilayah adalah areal dengan batas-batas tertentu yang memiliki arti (meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial.
- Nasoetion (1990): wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional.

Definisi Wilayah

Suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti dalam pendeskripsian fenomena, perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan

Konsep-konsep wilayah

- Tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas.
- Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah.

Pewilayahan → Klasifikasi Spasial

Tujuan Klasifikasi:

- Alat Penyederhanaan
- Alat Pendeskripsian
- Landasan untuk Pengelolaan
- Klasifikasi Spasial: berhubungan dengan objek-objek spasial
- Prinsip klasifikasi spasial:
 - Spatial contiguity
 - Spatial compactness

Beberapa Konsep Wilayah

Johnston (1976):

- a. formal region
- b. functional/nodal region

Richardson (1969); Hagget et al. (1977)

- a. uniform/homogeneous region
- b. nodal region
- c. planning/programming region

Blair (1991): nodal functional region

Wilayah Homogen

wilayah yang dibatasi berdasarkan pada kenyataan bahwa faktor-faktor dominan pada wilayah tersebut bersifat homogen, sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen).

wilayah-wilayah yang diidentifikasi berdasarkan faktor pencirinya yang menonjol di wilayah tersebut.

Contoh: Pewilayahan Komoditas

Prinsip-prinsip Konsep

Pewilayahan Homogen

- Minimize: Ragam di dalam kelompok (within groups)

- Maximize: Ragam antar kelompok (between groups)
- Spatial Contiguity
- Area/Polygon Compactnes

Prinsip no 1 & 2 adalah prinsip posedur/analisis gerombol (clustering

Wilayah sebagai Sistem

Sistem: Suatu entitas yang terdiri atas komponen- komponen yang memiliki keterkaitan (hubungan fungsional) satu sama lain

- Wilayah Sistem Sederhana/Dikotomik: wilayah nodal, sistem desa-kota, kawasan budidaya-lindung, dll.
- Sistem Kompleks: Sistem ekologi, sistem ekonomi, sistem sosial

Wilayah Nodal (1)

- wilayah diumpamakan “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti.
- Inti (pusat simpul): pusatpusat pelayanan dan atau pemukiman
- plasma adalah daerah belakang (periphery /hinterland)
- Batas wilayah didasarkan atas hubungan suatu pusat dan daerah layanannya

Fungsi Pusat wilayah:

- tempat konsentrasi penduduk (pemukiman);
- pusat pelayanan terhadap daerah hinterland dan
- pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri;
- lokasi pemusatan industri manufaktur (manufactory) yang diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktorfaktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu.

Fungsi hinterland

- pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku;
- pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan commuting (menglaju) dan migrasi
- sebagai daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur ; dan

- penjaga keseimbangan ekologis

PERTEMUAN 4

HUKUM LAUT

Bagian dari hukum internasional yang berisi norma-norma tentang :

- (1) pembatasan wilayah laut;
- (2) penggunaan laut;
- (3) hukum yang berlaku di atasnya;
- (4) Hak dan kewajiban suatu negara terkait pemanfaatan laut.

ERA YUNANI KUNO

- Sejak 1500 SM, terbentang jalur perdagangan dari India ke Kawasan Mediterrania.
- Rhodes merupakan sebuah kota pelabuhan di kawasan Yunani kuno yang paling maju saat itu.
- Rhodes terkenal akan prinsip freedom of seas dan prinsip perlindungan jalur perdagangan.
- Abad 3-2 SM, Rhodes mengodifikasi aturan hukum laut Rhodes. Hukum laut menjadi dasar yurisprudensi maritim modern.
- Hukum laut Rhodian ini diantaranya mencakup regulasi persekutuan dagang, joint adventure, charter parties, dokumen muatan, standar perilaku penumpang kapal dan pertanggungjawaban nahkoda/pelayar dalam kasus kelalaian atas tugas.

ERA KEKAISARAN ROMAWI

- Konsep “Mare Nostrum” (our sea) kekaisaran Romawi atas laut Mediterrania.
- Kekaisaran Romawi berdaulat penuh atas laut Mediterrania dengan mengesampingkan kerajaan-kerajaan lain (penetapan hukum laut internasional sepihak).
- Hukum laut Romawi kuno secara umum dipengaruhi oleh hukum laut Rhodes.

KERAJAAN SRIWIJAYA

- Dengan armada yang kuat dan kemampuan navigasi yang handal, Kerajaan Sriwijaya memberikan jaminan bebas dari perompak dan bajak laut kepada kapal-kapal dagang.
- Kerajaan Sriwijaya mendapatkan pemasukan dari pajak singgah/bersandar kapal, pajak bongkar-muat, dan biaya penyediaan perbekalan.
- Kerajaan Sriwijaya menjunjung tinggi prinsip freedom of sea and navigational.

TREATY OF TORDESILLAS – MARE CLAUSUM

- Pada tahun 1494, Spanyol dan Portugal sepakat untuk membagi wilayah benua Amerika dengan garis demarkasi berada di bagian timur Brazil hari ini dan dilegitimasi oleh Paus Alexander VI.
- Tanah dan Laut disebelah timur garis demarkasi menjadi hak milik Portugal sedangkan disebelah barat menjadi milik Spanyol.
- Spanyol dan Portugal berusaha melahirkan konsep Laut Tertutup (Mare Clausum) untuk memperkuat hegemoni.

HUGO DE GROOT – MARE LIBERUM

- Pada tahun 1609, Hugo de Groot mencetuskan konsep laut bebas (Mare Liberum).
- Laut adalah territorial internasional dan semua bangsa bebas menggunakannya untuk perdagangan, perikanan, dan transportasi.
- Groot memperkenalkan konsep innocent passage over land and at sea.

DEKLARASI JUANDA – 13 DESEMBER 1957

Konsep negara kepulauan mengacu pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi ini diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

DEKLARASI JUANDA – 13 DESEMBER 1957

- Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
- Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
- Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan :
 - Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
 - Untuk menentukan batas--batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
 - Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

MATRA LAUT ADALAH FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN: KEDAULATAN, TATA KELOLA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, DAN JASA KELAUTAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau--pulau yang menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

MATRA LAUT ADALAH FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN: KEDAULATAN, TATA KELOLA RUANG, SUMBERDAYA ALAM, DAN JASA KELAUTAN

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut yang mempersatukan pulau-pulau yang menyebar di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-

undangan. Laut menjadi faktor dominan pembangunan sehingga patut menjadi acuan penyusunan pola dasar kebijakan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS 1982)

ESENSI UNCLOS

- Penegasan hak-hak dan kewajiban negara pantai atas laut teritorial dan laut kepulauan (bagi negara kepulauan) dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalamnya
- Negara pantai mempunyai kedaulatan pengelolaan SDA di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai batas 200 mil laut yang meliputi permukaan dan kolom air laut, landas kontinen dan udara yang berada di atasnya
- Negara pantai mempunyai hak dan kewajiban atas zona tambahan sampai dengan 24 mil laut diukur dari garis pangkal
- Negara pantai mempunyai hak atas landas kontinen sampai dengan 200 mil laut diukur dari garis pangkal dan dapat diperluas sampai tidak melebihi 350 mil laut
- Dengan hak-hak dan kewajiban atas wilayah laut dan sumberdayanya tersebut negara pantai dapat membuat kebijakan pengelolaan serta penegakan hukumnya
- Dengan semua hak-haknya negara pantai berkewajiban untuk menghargai hak-hak masyarakat dunia terkait dengan kepentingan pelayaran, perlindungan lingkungan, ekonomi dan keamanan.

UNDANG--UNDANG 17 / 1985 TENTANG RATIFIKASI UNCLOS 1982: Penegasan Indonesia sebagai negara kepulauan

PERTEMUAN 5

PERMASALAHAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

PERMASALAHAN GLOBAL

Isu kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ)

Memacu percepatan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan.

contoh: potensi Kawasan Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. bencana alam dan kerusakan lingkungan

Sumberdaya air bersih

- 1.673 pulau di Indonesia merupakan pulau berpenduduk, 34 pulau diantaranya adalah pulau besar (luas lebih dari 2.000 km²).
- Pertambahan penduduk Indonesia yang sangat cepat, 1.8 - 2.0%/tahun.

Sumber daya air di wilayah pulau-pulau kecil terdiri dari 3 jenis sumber daya air yaitu air atmosferik (hujan), air permukaan, dan ekosistem pesisir dan terumbu karang

Luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60.000 km². Terumbu karang yang masih berkondisi baik hanya sekitar 6,2%.

Ancaman yang tercatat : pembangunan daerah pesisir, polusi laut, sedimentasi dan pencemaran dari darat, overfishing, destruktif fishing, dan coral bleaching akibat pemanasan global.

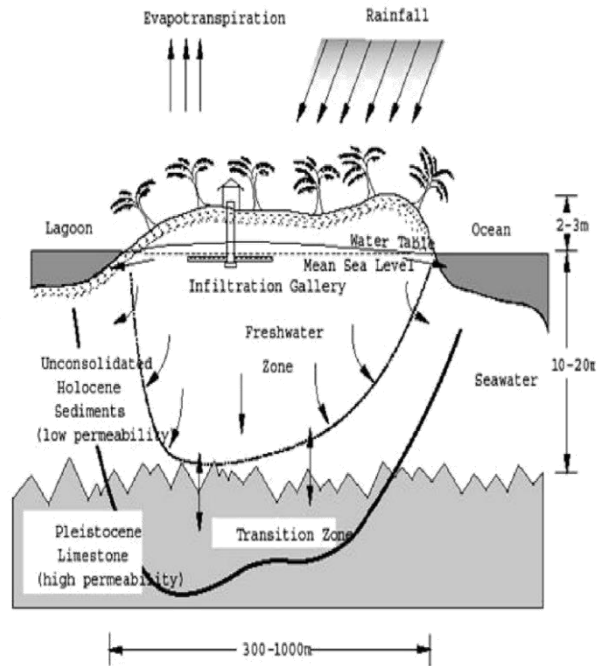
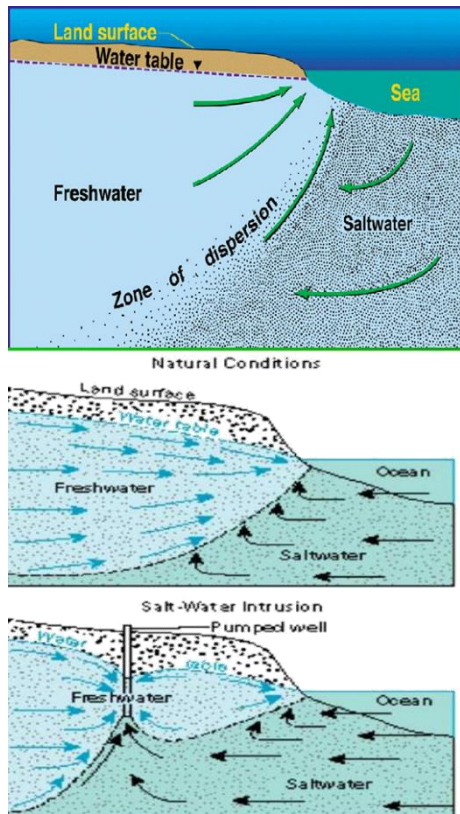


FIGURE 5.2 Cross-section through a small coral island showing main features of a fresh-water lens (exaggerated vertical scale).
Source: Falkland 1999



PERMASALAHAN NASIONAL

- Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik, peluang usaha, permasalahan dan lain lain;
- Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal, belum berpenghuni atau jarang penduduknya namun memiliki potensi sumberdaya alam yang baik;
- Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang dapat menghubungkan dengan pulau induk (mainland) dan antara pulau-pulau kecil;

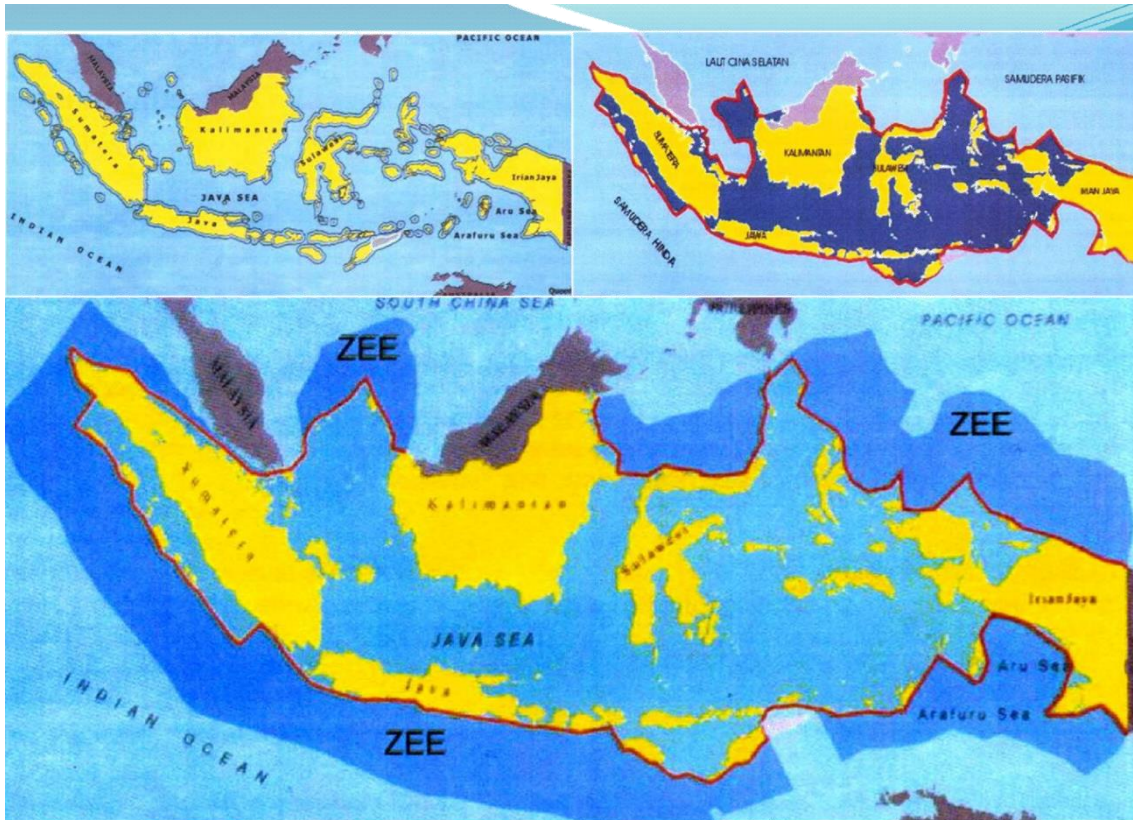
Beberapa pulau kecil telah menjadi sengketa antar propinsi dan kabupaten/kota;

- Belum jelasnya kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/ Kota ;
- Sebagian pulau-pulau kecil terluar yang memiliki fungsi strategis karena berkaitan dengan batas antar Negara terancam hilang karena penambangan pasir yang tak terkendali;

PERMASALAHAN NASIONAL

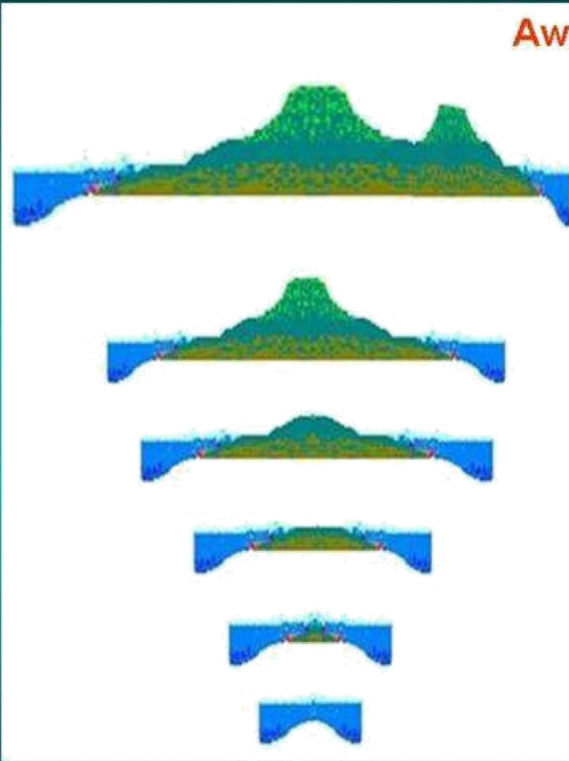
Terjadinya pencemaran di sekitar perairan pulau-pulau kecil akibat meningkatnya pembuangan limbah padat dan cair;

- Pulau-pulau kecil berpotensi menjadi tempat kegiatan yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan nasional;
- Masih terbatasnya sistem pemantauan, patroli dan pengawasan (Monitoring, Controlling dan Surveillance/MCS) di pulau-pulau kecil.



GAMBAR 4
Sumberdaya hidrokarbon dan mineral lepas pantai Indonesia.
(Katili)

Aware on Indonesian Islands



1. Large island : > 10.000 sq km
(Kalimantan, Papua, Sumatera,
Sulawesi, Jawa, Bangka, etc)

2. Small Island : <= 10.000 sq km
(+ volcano)

3. Small island : <= 10.000 sq km
(no volcano)

4. Micro island : <= 1 sq km
(relatively flat)

5. Mangrove forest
(underwater level)

6. Coral reef (underwater level)

Alamsyah 2007

PERTEMUAN 6

PERMUKIMAN

Permukiman ≠ Perumahan

Undang-Undang No.1 tahun 2011 :

bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Koestoer(1995) :

batasan permukiman adalah terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

Parwata (2004) :

suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya.

Van der Zee (1986) :

Permukiman (Settlement) merupakan suatu proses seseorang mencapai dan menetap pada suatu daerah

Doxiadis (1967) :

Permukiman adalah tempat manusia hidup dan berkehidupan

EKISTICS (modern Greek: OIKISTIKH OIKISTIKH OIKISTIKH OIKISTIKH is derived from the ancient Greek adjective οικιστικός more particularly from the neuter plural οικιστικά as physics is derived from φυσικά Aristotle). The ancient Greek adjective οικιστικός meant: "concerning the foundation of a house, a habitation, a city or colony; contributing to the settling." It was derived from οικιστικός an ancient Greek noun meaning "the person who installs settlers in place". This may be regarded as deriving indirectly from another ancient Greek noun, ο κτιστής meaning "building", "housing", "habitation", and especially "establishment of a colony, a settlement, or a town" (already in Plato), or "filling with new settlers", settling", "being settled". All these words grew from the verb οικίζω to settle and were ultimately derived from the noun ο κός house", "home" or "habitat Ekistics mempunyai arti yang lebih luas dari sekedar permukiman. Di dalamnya termasuk pengertian mengenai hubungan manusia dengan manusia, dengan masyarakat dan dengan alam

Terdiri dari :

- the content (isi) yaitu manusia
- the container (tempat fisik manusia tinggal yang meliputi elemen alam dan buatan manusia)

Elemen Ekistics:

- Alam, memberikan pondasi tempat permukiman terbentuk atau dibentuk dan kerangka yang di dalamnya suatu permukiman dapat berfungsi;
- Manusia;
- Society;
- Shells, suatu struktur yang di dalamnya manusia dapat hidup dan berkehidupan sesuai fungsinya;
- Jejaring, baik yang alamiah maupun yang buatan yang memfasilitasi fungsinya suatu permukiman (misalnya Jalan, listrik, air)

PERTEMUAN 7

Nilai Penting Pesisir bagi Indonesia

Secara sosial, Sekitar 60% penduduk tinggal di pesisir; sebagian besar kota (prov & Kab/kota) terletak di pesisir; kontribusi sektor kelautan sekitar 12,4% (menyerap lebih 16 juta tenaga kerja)

Secara biofisik, memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada (81.000 Km); 75% dari wilayahnya merupakan perairan (5,8 juta km² termasuk ZEEI); Negara kepulauan terbesar di dunia.

Nilai Penting Pesisir bagi Indonesia

Secara politik,

- a) Keberadaan UU 22/1999 & UU 25/1999 yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola kawasan pesisir dan laut;
- a. b) Keberadaan KPP yang diharapkan menjadi lokomotif penggerak pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Kompleksitas Wilayah Pesisir

- Penentuan wilayah pesisir sangat bervariasi tergantung karakteristik lokal kawasan tsb.
- Adanya keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) antar ekosistem.
- Dapat memicu konflik kepentingan dalam pengelolaan
- Secara sosial ekonomi, biasanya dihuni beragam kel. Masyarakat
- Common property
- Keterpaduan Wilayah/Ekologis
- Keterpaduan Sektor.
- Keterpaduan Disiplin Ilmu

- Keterpaduan Stakeholders
- Keterpaduan Antar Negara

Pertemuan 8

Konsep Manajemen Pengelolaan Pesisir & Pulau- Pulau Kecil

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terbesar di dunia 17.508 pulau, dan luas laut yang mencapai 5,8 juta km² (70% dari luas wilayah Indonesia), memiliki garis pantai sepanjang ± 81.000 km. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan

Total Nilai sumberdaya hayati perikanan Indonesia sekitar US\$ 82 Milyar per tahun dengan jumlah tenaga yang dapat diserap sekitar 10 juta orang per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007) potensi nilai ekonomi ekosistem perairan Indonesia (*as coastal shelf*) adalah sekitar US\$ 39,4 Milyar per-tahun (*Costanza et al. 1997*)

Fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan-kawasan termiskin. Total dari 183 kabupaten yang tertinggal di Indonesia 50% nya merupakan kabupaten pesisir dan kepulauan Paradigma pembangunan yang saat ini masih berorientasi kepada daratan membuat potensi kelautan yang besar tersebut kurang digali secara optimal.

Kebijakan

- UUD 1945, Pasal 25 dan Pasal 33
- UU No. 1/1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- UU No. 5/1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran
- UU No. 43/2008 Tentang Wilayah Negara
- UU No. 21/2009 Tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*

- UU No. 45/2009 Tentang Perubahan ketiga UU No. 9/1985 Tentang Perikanan

Deklarasi Bunaken (1998)

Kesadaran bangsa Indonesia akan geografi wilayahnya; dan

Kemauan yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun kelautan.

“Seruan Sunda Kelapa” (2001)

- Membangun kembali wawasan bahari;
- Menegakkan kedaulatan secara nyata di laut;
- Mengembangkan industri dan jasa maritim secara optimal dan lestari bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Mengelola kawasan pesisir, laut, dan pulau kecil; serta Mengembangkan hukumnasional di bidang maritim.

UU 17/2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025 yang memuat pembangunan bidang kelautan dan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia/WOC di manado tahun 2009.

Deklarasi Kelautan Manado (*Manado Ocean Declaration*)

Menyelematkan planet bumi dan kelangsungan hidup generasi penerus di masa akan datang.

Poros Maritim Dunia (2014) Visi presiden terpilih Joko Widodo

Konsep Pengelolaan Pesisir & Pulau- Pulau Kecil

Pembangunan P3K Berbasis Eko-sosiosistem

Terdapat 5 aspek :

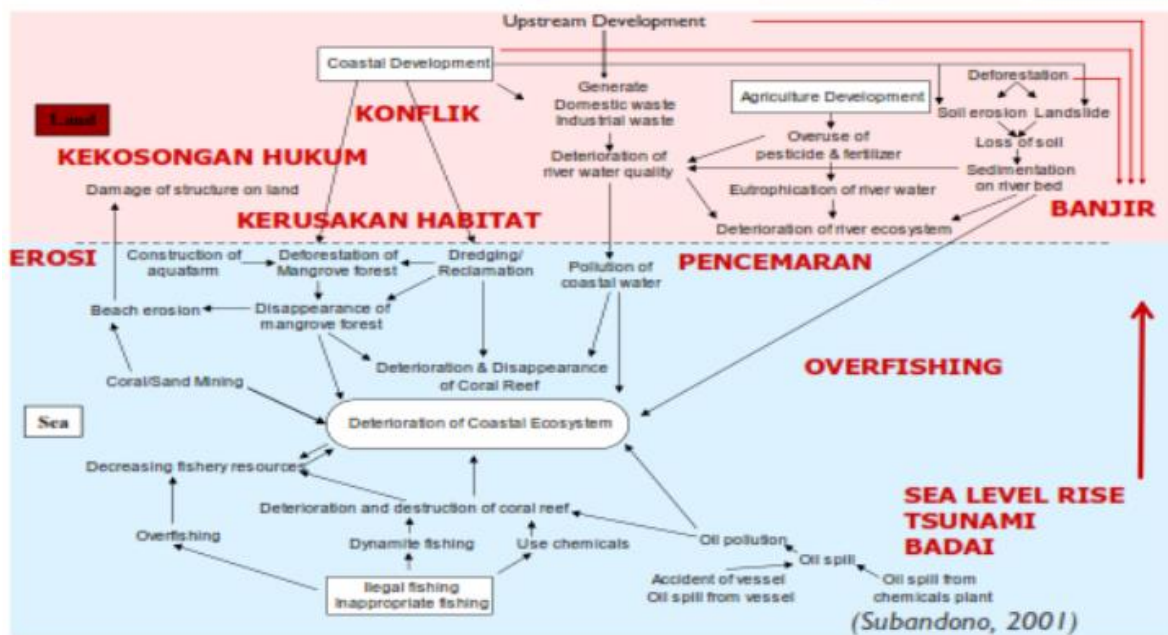
1. Keterpaduan sektor (berbagai sektor pembangunan di wilayahpesisir, seperti perikanan (tangkap dan budidaya), pariwisata,pertambangan migas, perhubungan dan pelabuhan, pemukiman, pertanian, dkk;)
2. Keterpaduan wilayah/ekologis, yaitu antara daratan danperairan (laut) yang masuk dalam suatu sistem ekologis;
3. Keterpaduan *stakeholders* dan tingkat pemerintahan;
4. Keterpaduan antar berbagai disiplin ilmu;
5. Keterpaduan antar Negara.

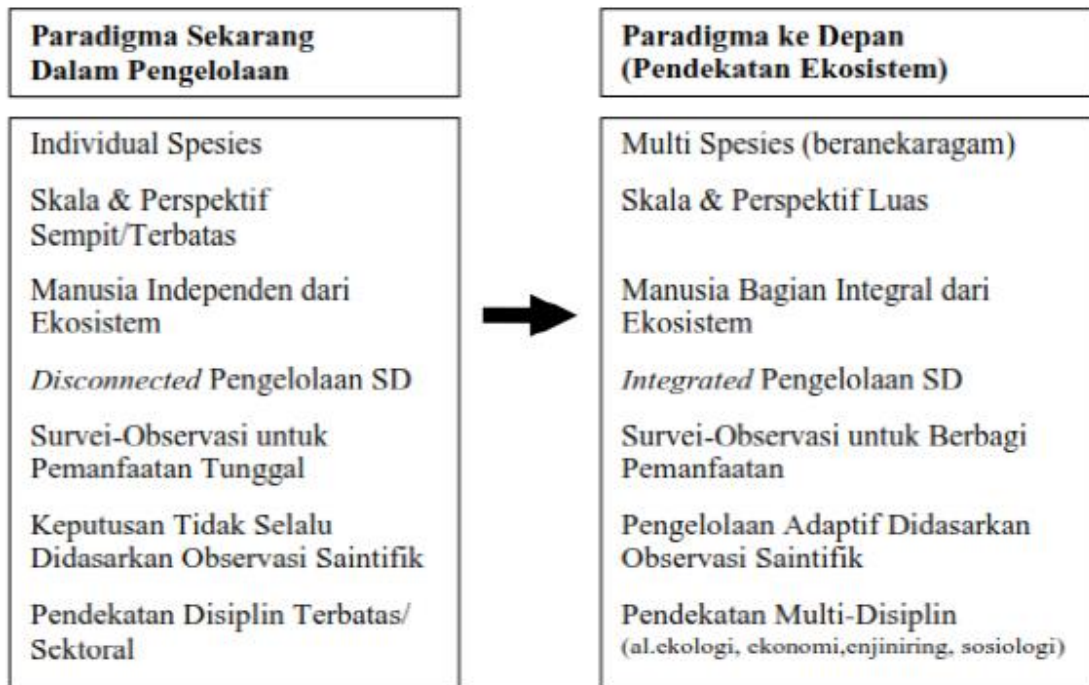
Pembangunan Berkelanjutan, merupakan integrasi dari aspekaspek

berikut ini :

1. Kelestarian sistem penunjang kehidupan;
2. Aspek keadilan dan pemerataan antar waktu dan antar wilayah
3. Pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya manusia (*empowering*), terutama kelompok masyarakat marjinal dan kelompok paling miskin (*poorest of the poor*), dan di antara kelompok tersebut peranan wanita adalah yang sangat esensial
4. Pertumbuhan ekonomi
5. Efisien dan keadilan alokasi sumberdaya alam Pembangunan Pulau-Pulau Kecil dengan Pendekatan Pola *Agromarine*
 - Kesesuaian dan Daya dukung Lingkungan;
 - Pendekatan Agrobisnis;
 - Pendekatan Kemitraan.

Pengelolaan P3K dengan ecosystem approach





Sumber : Moorsalam R. Ngaramo & Gede Santika, 2009

Pengembangan Sabuk ekonomi Maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota pantai

- Konsep ini diajukan oleh Dewan Maritim Indonesia
- Merupakan konsep dengan pendekatan konseptual
- Sebuah konsep untuk mendesain pembangunan ketahanan ekonomi yang berorientasi pada sumber daya maritim dengan menekankan pembangunan jaringan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat (menghubungkan pusat- pusat produksi dan perdagangan antara pulau-pulau kecil dan kotakota pantai)
- Harus dilaksanakan secara terpadu

Sejarah Kemaritiman Indonesia

* Kerajaan Sriwijaya (683 M – 1030 M)

- Memiliki armada laut yang kuat;
- Menguasai jalur perdagangan laut;
- Memungut cukai atas penggunaan laut;
- Pengaruhnya meliputi Asia Tenggara;
- Terdapat hubungan yang erat dengan Kerajaan Campa yang terletak di antara Camboja dan Laos.



Sumber : <https://saripedia.wordpress.com/tag/peta-wilayah-kekuasaan-Srivijaya/>

Kerajaan Mataram kuno (Jawa Tengah bersama kerajaan lainnya seperti Kerajaan Tarumanegara) telah membangun Candi Borobudur yang pada relief dindingnya dapat terlihat gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kokoh dan telah menggunakan layar segi empat yang lebar.

Kejayaan Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara telah memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lintas laut.

Kerajaan Majapahit (1293 M – 1478 M)

- memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara.

- Dengan kekuatan armada lautnya, Patih Gajah Mada mampu berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan, sekaligus menanamkan pengaruh, melaksanakan hubungan dagang dan interaksi budaya.



Sumber : <https://saripedia.wordpress.com/tag/peta-wilayah-kekuasaan-majapahit/>

Hilangnya Sejarah Kemaritiman Indonesia

Praktek kebaharian kolonial Belanda pada masa lalu

- Masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda.
- Pengikisan semangat bahari Bangsa Indonesia yang dilakukan oleh kolonial dengan menggenjot masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas agraris untuk kepentingan kolonial dalam perdagangan rempah-rempah ke Eropa.

* Kebijakan pembangunan bahari pada masa rezim Orde Baru minimnya keberpihakan rezim Orde Baru untuk membangun kembali Indonesia sebagai bangsa bahari. Akibatnya, dalam era kebangkitan Asia Pasifik, pelayaran nasional kita kalah bersaing dengan pelayaran asing akibat kurangnya investasi.

Benua Maritim Indonesia

Pengertian Negara Maritim & Benua Maritim:

- Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan/teritorial laut yang sangat luas;
- Negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau
- Negara maritim adalah negara yang banyak dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan
- Arti maritim adalah wilayah laut, negara maritim adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan.
- Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah dengan hamparan pulau-pulau di dalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara dengan sudut pandang iklim, cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keberagaman biota serta tatanan sosial budaya

Diskusi Lanjutan!

Apakah Tol Laut termasuk dalam Konsep pengembangan berbasis maritim di Indonesia?

- * Apakah kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia sudah mempertimbangkan kondisi karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan?
- * Apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia? Bagaimana terjemahan visi tersebut dalam ruang spasial Indonesia?

Pertemuan 9

adaptasi nelayan di permukiman nelayan muara karang

metode penelitian kualitatif

1. masalah penelitian fokus penelitian ruang lingkup penelitian
2. tujuan penelitian kerangka teori / kerangka konseptual
3. metode penelitian existential phenomenology

MASALAH PENELITIAN

. *FOKUS PENELITIAN* :

Fokus penelitian kami adalah pada Peran Nelayan MuaraAngke dalam isue jati diri dan **kemiskinan** , partisipasinya dalam aplikasi pembangunan Kota di bidang perencanaan, fisik dan pengelolaan sumber daya alam ,tampilan adaptasi terhadap lingkungannya (perubahan iklim) serta **Pemerataan Pembangunan** (Kebijakan Pemerintah)

RUANG LINGKUP PENELITIAN :

- . Nelayan MuaraAngke (Klasifikasi dan tingkah laku)
- . Integrasi dan partisipasi nelayan dalam pembangunan bidang fisik
- . Nelayan dalam pemahamannya dengan sumber daya alam dan lingkungan
- . Nelayan dalam perencanaan sebuah kota

TUJUAN PENELITIAN

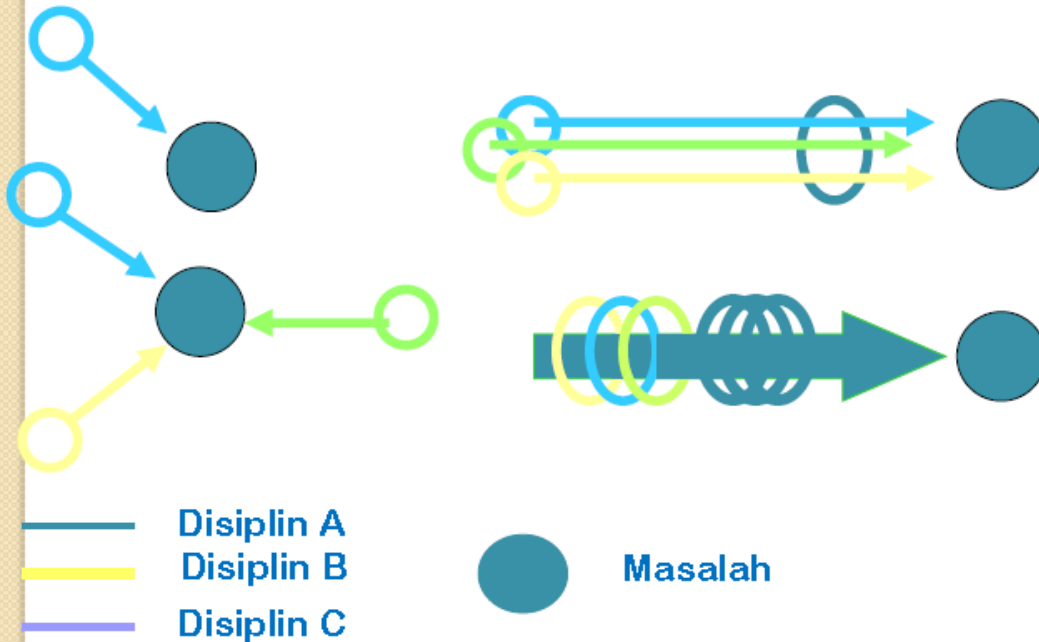
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, menemukan atau mendapatkan suatu kesadaran baru, cara pandang kita terhadap nelayan di muara Angke yang menempatkan mereka setara dengan masyarakat lainnya dalam koridor partisipasinya dalam Pembangunan

Kota di bidang pembangunan manusia, fisik dan kemampuan mereka beradaptasi dan membangun lingkungannya. Melalui catatan kaki para nelayan sebagai unit analisa yang berlokasi di muara angke Jakarta Utara yang direncanakan akan di teliti dengan menggunakan suatu metode penelitian **Constitutive Phenomenology** yang akan menghasilkan makna dibalik kehidupan para nelayan, yang acap kali terjadi adalah kekeliruan penafsiran terutama dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan yang lebih banyak dilihat sebagai kategori yang bersifat alami. Dalam tahap penelitian nanti nelayan akan didefinisikan secara umum sebagaimana manusia yang memiliki kesetaraan hak di dalam pemberdayaannya di dalam pembangunan sebuah Kota dan Bangsa. Dimana dalam stereotipi nilai jati diri yang dipahami banyak orang tentang nelayan terdapat ragam sudut pandang definisi yang dapat menumbuhkan konflik karena adanya beda konsep diri yang dipahami dari masing – masing subjek.

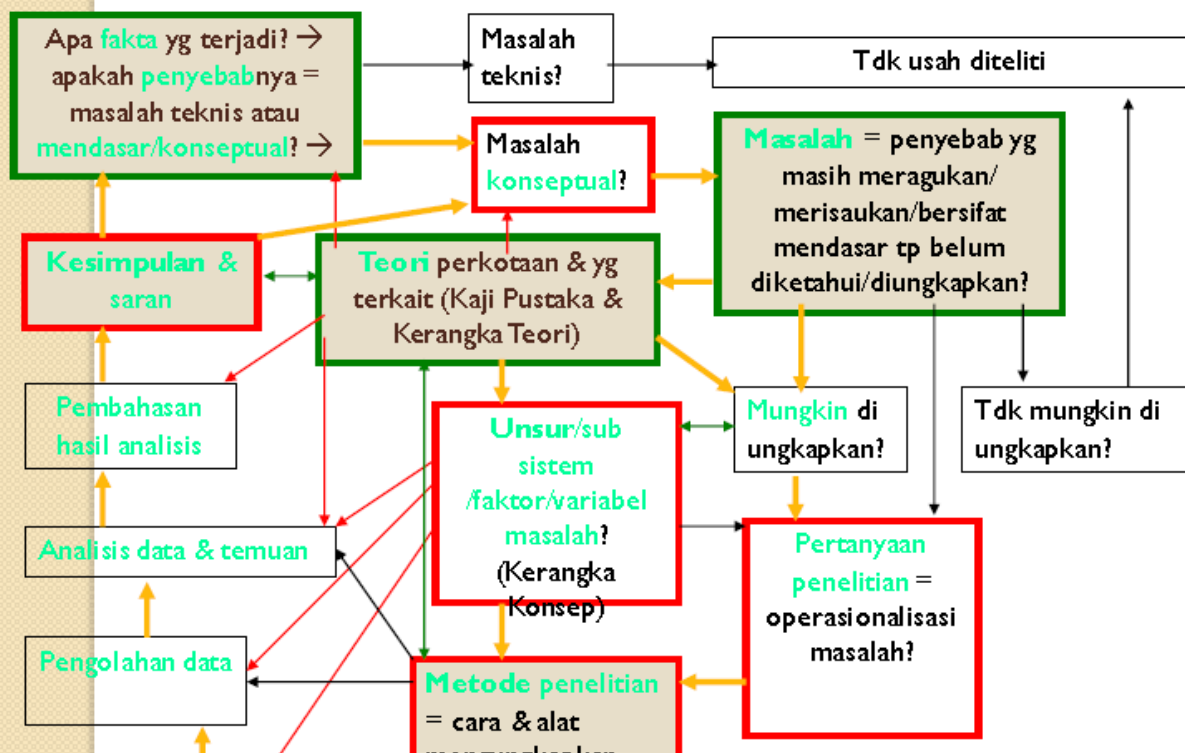
KERANGKA TEORI / KERANGKA KONSEPTUAL



Mono, multi, inter dan trans disiplin



Interaksi dan hasil kerja antar disiplin A, B, C dan D dapat dalam berbagai bentuk



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Penelitian *Constitutive Phenomenology* dimana didalam penelitian ini Masyarakat membentuk dunianya sendiri melalui kesadaran konstitutif maupun kesadaran rekonstitutif, yang melakukan tindakan apa adanya (*take it for granted*). Oleh karena itu, penelitiannya difokuskan kepada kehidupan sehari-hari

KONSEP BUDAYA

- . Pemahaman yang diyakini oleh Nelayan MuaraAngke
- . Mengetahui kebudayaan nelayan di perkampungan nelayan muara Angke
- . Pengetahuan yang mendalam dan mendasar bagi Nelayan di muara Angke
- . Pedoman bagi kehidupan masyarakat nelayan muara Angke
- . Kebudayaan dibedakan dari kelakuan dan hasil kelakuan nelayan muara Angke
- . Kelakuan itu terwujud atau berpedoman pada kebudayaan yang dimiliki oleh nelayan muara Angke

KONSEP BUDAYA

Referensi :

- Parsudi Suparlan, Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan Perspektif Antropologi Perkotaan
- Prof Dr koentjaraningrat , Pengantar Ilmu Antropologi.
- Susan Blackburn, Jakarta sejarah 400 tahun

Konsep Lingkungan Hidup

- . Fungsi dan manfaat mangrove telah banyak diketahui, baik sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin,

penyaring intrusi air laut ke daratan dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah migrasi burung, dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya bagi manusia, memperkecil efek gelombang tsunami yang menerjang pantai. Vegetasi mangrove, terutama perakarannya dapat meredam energi gelombang dengan cara menurunkan tinggi gelombang saat melalui mangrove. Namun, saat ini sungguh disayangkan, kondisi hutan mangrove begitu memprihatinkan, yaitu antara lain:

- Penumpukan sampah dari para wisatawan.
- Kondisi vegetasi mangrove yang kurang terawat. Mangrove terbagi dalam 4 zonasi, bila dikaitkan dengan pasang surut air laut, yaitu:
 - Areal yang selalu digenangi air walaupun saat pasang terendah. Didominasi *Avicennia* dan *Sonneratia*.

Areal yang digenangi oleh pasang sedang. Dominasi *Rhizophora*.

- Areal yang digenangi hanya pada saat pasang tinggi, areal ini lebih ke daratan. Umumnya didominasi oleh *Bruguiera* dan *Xylocarpus*.
- Areal yang digenangi hanya pada saat pasang tertinggi (hanya beberapa hari dalam sebulan). Didominasi *B. sexangula* dan *L. littorea*.

- Penebangan hutan mangrove

- Pembukaan lahan tambak

- PLTU Muara Karang mengubah struktur komunitas ikan, Crustacea, dan Mollusca di perairan ini. Hal ini tampak lebih jelas di perairan kolam pelimbahan. Biota akan mati bila batas toleransi suhu telah dilampauinya.

- Kerusakan tersebut membawa bencana bagi masyarakat sekitar Kampung Nelayan sehingga menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan berkurang, selain itu mangrove yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap tempat tinggal mereka dari ancaman angin dan ombak laut semakin berkurang.

Referensi

. Bengen, D. G. 1999. *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*. PKSPL-IPB, Bogor.

. Tomlinson, P. B. 1986. *The Botany of Mangrove*. Cambridge University Press, New York.

. Burhanuddin. 1986. Disertasi S3. PENGARUH LIMBAH AIR PANAS PLTU MUARA KARANG TERHADAP KOMPOSISI JENIS,KEJERAHAN,DAN SEBARAN MAKROFAUNA SERTA PENGAMATAN TOLERANSI SUHU PADA IKAN BANDENG DAN UDANG API-API. Dept. of Biology- ITB. Bandung.

Konsep Pembangunan Fisik dan arsitektur permukiman

Materi :

- . Tempat tinggalnya Nelayan, apakah mereka dalam membangun tempat tinggalnya mempertimbangkan kaidah-kaidah perencanaan bangunan dengan lingkungannya
- . Konstruksi bangunan apa, yang digunakan Nelayan dalam membangun tempat tinggalnya, apakah sudah dengan standar teknis bangunan
- . Apakah Prasarana, Sarana dan Utilitas penunjang dari Rumah Tinggalnya sudah cukup memadai atau memenuhi
- . Terjadinya Perubahan Iklim akibat Global Warming yang mempengaruhi terhadap tempat tinggal Nelayan

Konsep Pembangunan Fisik dan arsitektur permukiman

referensi:

- . Konsepsi hunian Nelayan dengan melihat Nelayan sebagai Content dan Muara Karang sebagai Container (C.A. Doxiadis, Ekistics: An introduction to the Science of Human Settlements ,Oxford University Press, London, 1968)
- . Menganalisa tapak site dari hunian Nelayan dari konsep perencanaan tapak (White, Edward T., Analisa Tapak, cetakan ke 5, Intermatra, Bandung)
- . Menganalisa konstruksi bangunan rumah tinggal Nelayan dari mulai pondasi hingga atap disesuaikan standar teknis bangunan (Frick Heinz, 1991. Dasar-Dasar ilmu Konstruksi dan Struktur Bangunan Yogyakarta)
- . Mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai prasarana, sarana dan utilitas dari rumah tinggal Nelayan
- . Perencanaan tempat tinggal yang sadar terhadap lingkungan dan bahaya terhadap perubahan iklim

Konsep Perencanaan Pembangunan

Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat (CBM)

Beberapa kelebihan (nilai-nilai positif) dari model CBM ini :

- . Mampu mendorong pemerataan (*equity*) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- . Mampu merefleksikan kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik.
- . Mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada.
- . Mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomi dan ekologi.
- . Responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal.
- . Masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan.

Konsep Perencanaan Pembangunan

Pola pendekatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara :

- . Program Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), sebagai salah satu upaya perencanaan berdasarkan rumusan yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat dan kelembagaan desa; dan

Konsep Perencanaan Pembangunan

- . Pendekatan PRA (*Participatory Rural Appraisal*) Pola Pendekatan ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dalam kaitannya dengan hal ini, penggalian akar budaya/aturan setempat menjadi salah satu fokus kegiatan yang perlu diprioritaskan, sedangkan upaya-upaya untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia harus terus dilakukan, misalnya :

- . Pelatihan keterampilan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
- . Penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan
- . Pelatihan intensifikasi perikanan
- . Pembentukan kelompok swadaya masyarakat

Konsep Perencanaan Pembangunan

- . Referensi

Nikijuluw, V.P.H. 1994. *Sasi sebagai suatu Pengelolaan Sumberdaya Berdasarkan Komunitas (PSBK) di Pulau Saparua, Maluku*. Jurnal Penelitian Perikanan Laut, 93 : 79-92.

Pertemuan 10

Pengembangan Ekowisata Bahari Sebagai Model Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Karimunjawa



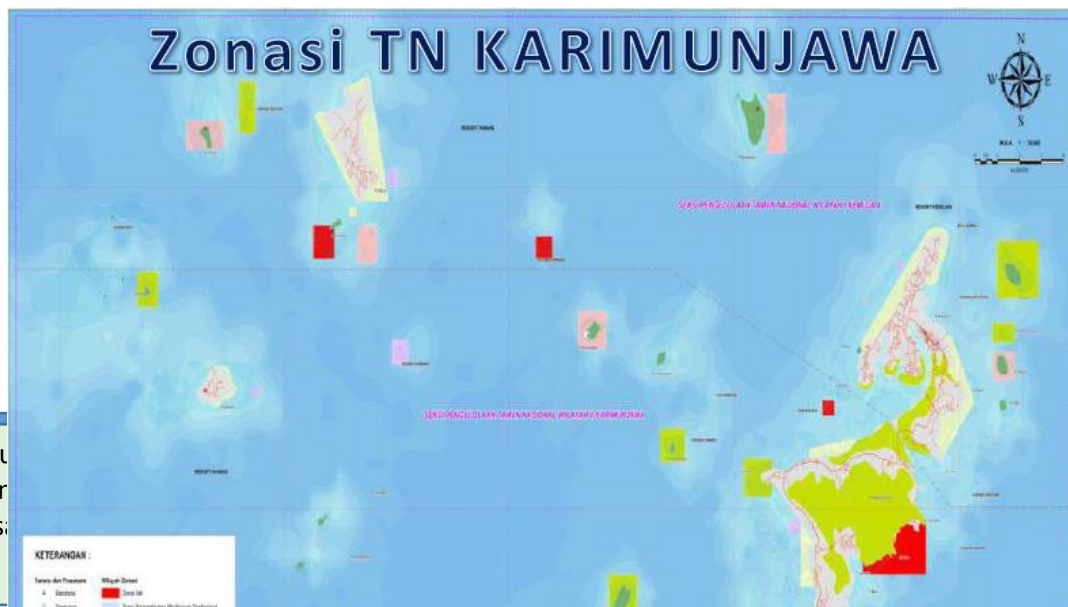


MISI TN KARIMUNJAWA

1. Meningkatkan **efektifitas pengamanan** kawasan sebagai upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Meningkatkan **upaya pengawetan** keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
3. Mewujudkan **pemanfaatan** sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat.

DASAR HUKUM TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

TAHUN	STATUS	DASAR
1982	Disetujui sebagai Taman Nasional dan Daerah Pengembangan Wisata Bahari.	Surat Gubernur Jateng No. 556/21378 tgl 26 Okt 1982.
1986	Penunjukan sebagai Cagar Alam Laut.	SK Menhut No. 123/Kpts-II/1986 tgl 19 April 1986.
1988	Dinyatakan sebagai Taman Nasional.	Surat Pemyataan Menhut No. 161/ Menhut-II/1988 tgl 23 Pebruari 1988.
1999	Ditetapkan sebagai Taman Nasional Karimunjawa.	SK Menhutbun No. 78/ Kpts-II/1999 tgl 22 Pebruari 1999
2005	Revisi Zonasi Taman Nasional Karimunjawa.	Sk Dirjen No. 79/ IV/set – 3/ 2005



Modu
Perer
Jurusa

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 6186/Kpts-II/2002,
Taman Nasional Karimunjawa dikelola oleh Balai Taman Nasional

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional Karimunjawa
(sesuai Peraturan Menhut P.02/Menhut-II/2007) Tanggal 1 Februari 2007



6

Struktur organisasi PEH



Struktur organisasi POLHUT



POTENSI WISATA Pulau Karimunjawa



POTENSI WISATA Pulau Karimunjawa



Dive Sites



- Spot Diving Pulau Kembar
- Spot Diving Pulau Kumbang
- Spot Diving Karang Katang
- Spot Diving Indonor
- Spot Diving Taka Menyawakan
- Spot Diving Tanjung Gelam
- Spot Diving Cemara Kecil
- Spot Diving Menjangan Kecil
- Spot Diving Pulau Geleang
- Spot Diving Pulau Krakal

POTENSI Wisata di Pulau Parang & Nyamuk

A Pantai Batu Hitam

B Pantai Timur1

C Pantai Timur2

D Pantai Timur3

E Pantai Batu Merah

F Pelabuhan Parang

G Pantai Timur3

H Mercusuar Nyamuk

I Pelabuhan Parang

J Gua Parang

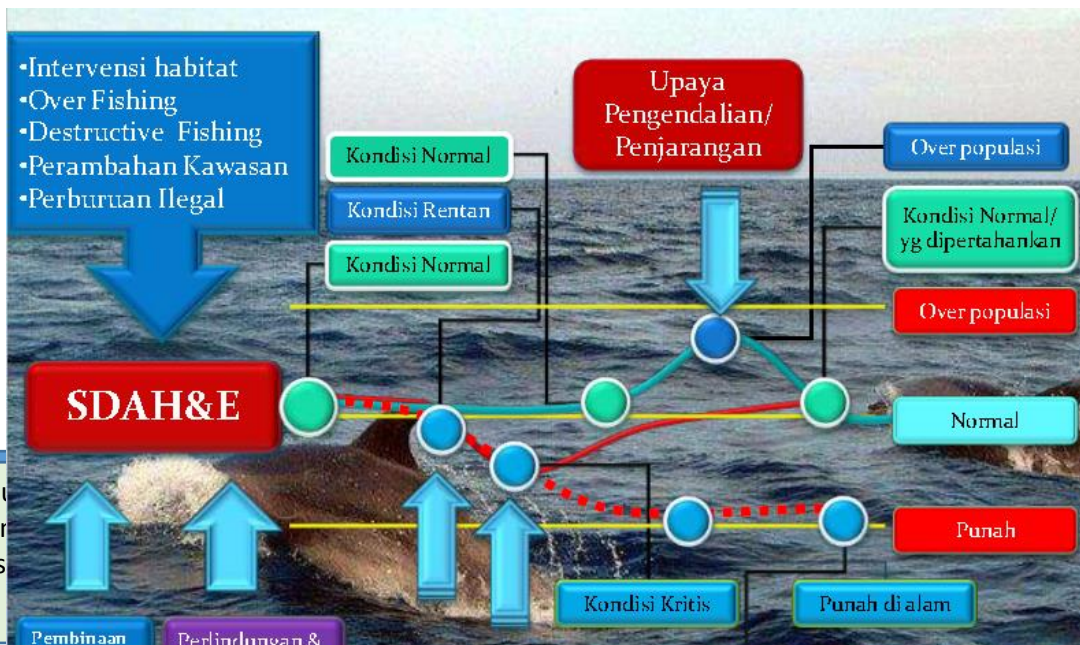
K Pantai Timur3

L Pantai Timur3

M Pantai Timur3

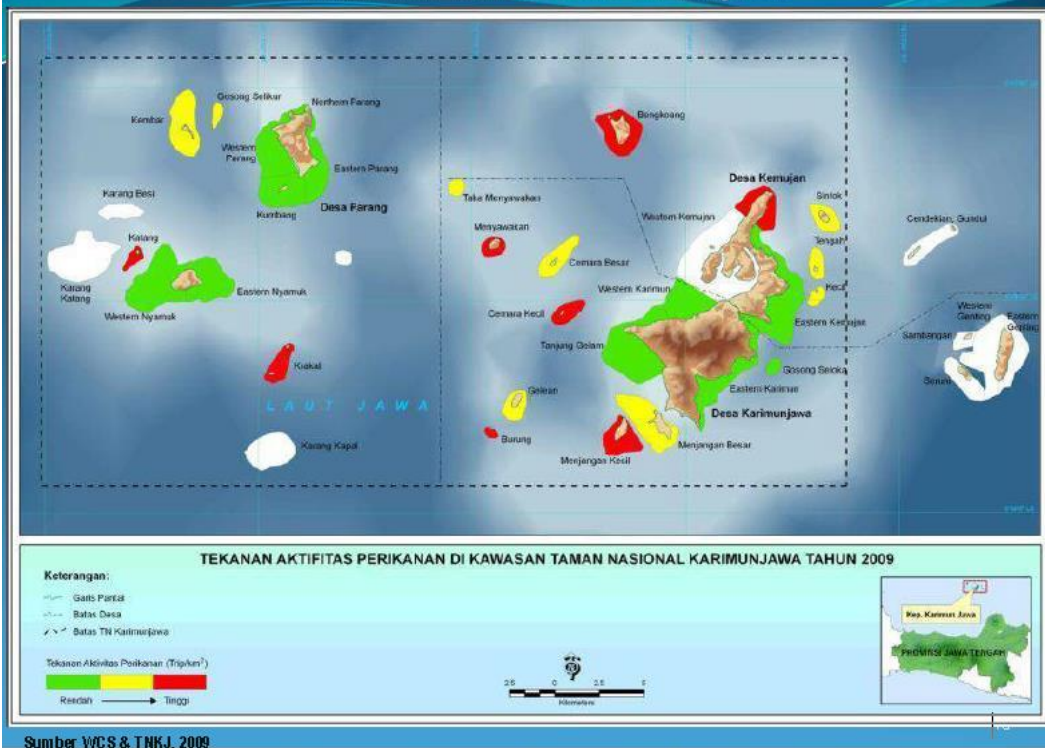
Mod
Pere
Jurus

Konsep Pengelolaan TN Karimunjawa

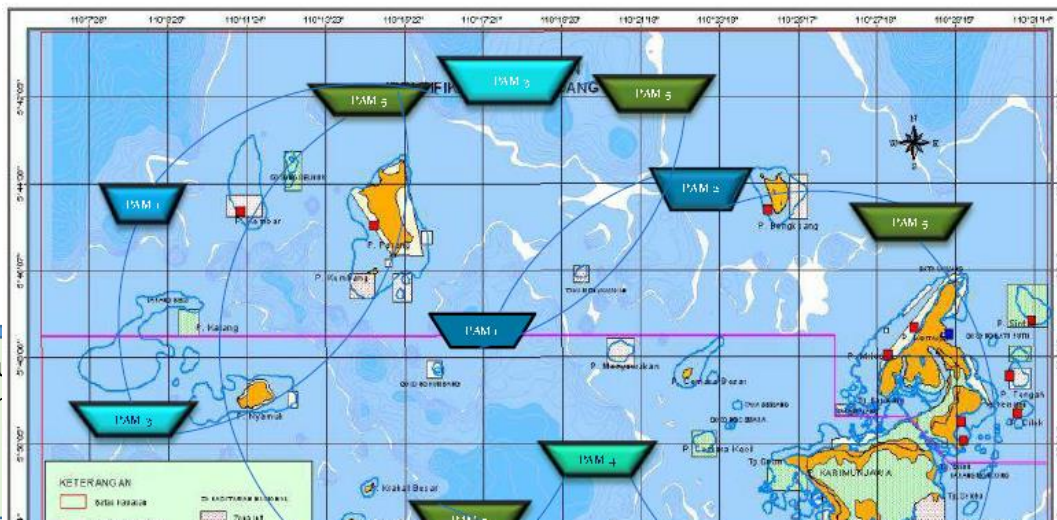


Modul
Perencanaan
Jurusan

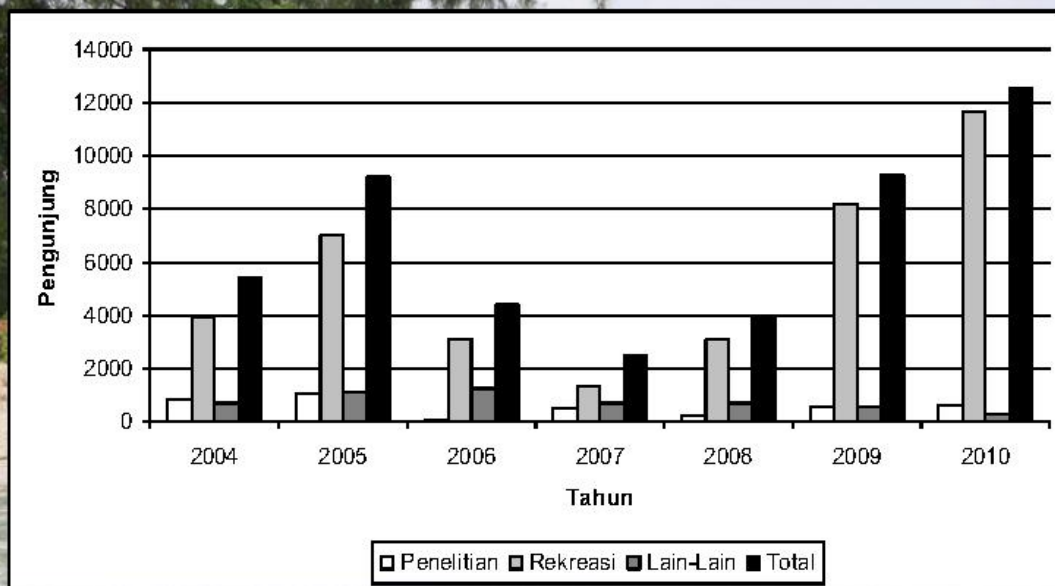
Tekanan aktivitas nelayan



Skema Daerah Yang Diamankan Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP)



Jumlah Pengunjung TN. Karimunjawa 6 Th Terakhir



VALUASI EKONOMI EKOSISTEM DI TN KARIMUNJAWA

Manfaat tidak langsung

Keberadaan ekosistem

Nilai ekonomi keberadaan ekosistem di Taman Nasional Karimunjawa adalah sebesar **11,2 M per tahun**

EKOSISTEM	LUAS	NILAI EKONOMI (\$/Ha)	TOTAL (\$)
Hutan hujan tropis dataran rendah	1.285,5	296.56	381.227,88
Hutan mangrove	396,90	828.10	328.672,89
Padang lamun	97,28	349.50	33.999,39

VALUASI EKONOMI EKOSISTEM DI TN KARIMUNJAWA (Balai TNKj dan WCS, 2008)

Valuasi ekonomi terhadap ekosistem di TN Karimunjawa dihitung berdasarkan manfaat langsung berupa produksi perikanan dan manfaat tidak langsung dari kegiatan wisata dan keberadaan ekosistem.

- Manfaat Langsung

- a. **Produksi perikanan**

Penghasilan yang diterima masyarakat Karimunjawa : **Rp 6,421 M** per tahun

- b. **Perjalanan wisata**

Total biaya yang dikeluarkan pengunjung berkisar Rp 2,9-Rp 21 M dengan rata-rata **Rp 7,5 M** per tahun

- c. **Budidaya rumput Laut**

Jumlah total income dari 2600 petani rumput laut mencapai **13,2 M** per tahun

- d. **Penggunaan Air Bersih**

Kajian nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya air di kawasan Taman Nasional Karimunjawa (Anonim, 2010) menunjukkan bahwa Kawasan kepulauan Karimunjawa merupakan kawasan bukan/non CAT (cekungan air tanah) sehingga tidak mempunyai aliran air tanah (ground water flow). Ketersediaan air yang ada hanya dari air permukaan dan kelembatan hutan.

19

TANTANGAN & PERMASALAHAN

- Tingginya Tingkat **Ketergantungan Masyarakat terhadap SDA TNKJ**
- Masih terbatasnya sumber **Mata pencaharian Alternatif** bagi masyarakat di sekitar TNKJ
- Kurangnya **sarana prasarana pendukung wisata alam (listrik, jalan, sanitasi, shelter, transportasi lokal, dll).**
- **Kapasitas Masyarakat** dalam pengelolaan Wisata belum memadai

SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KARIMUNJAWA

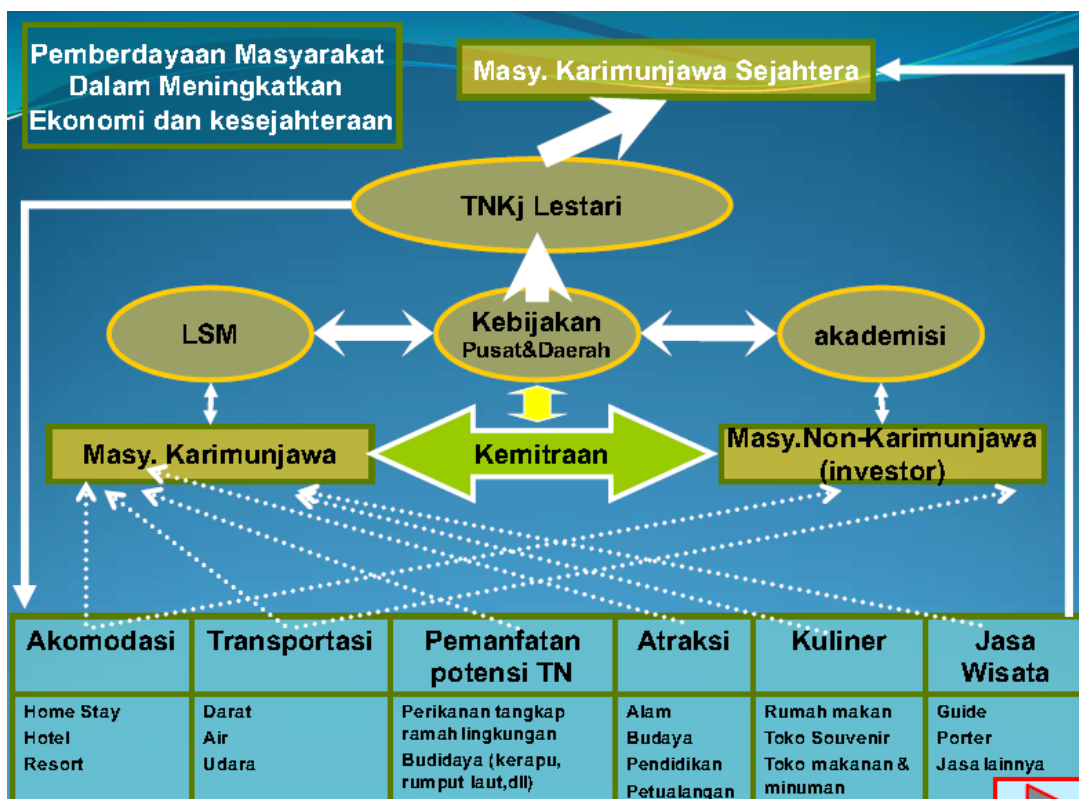
- Terdapat sejumlah 10.000 Jiwa Penduduk yang tinggal di 4 Pulau Utama yaitu Pulau Karimunjawa, Kemujan, Parang dan Nyamuk
- Terdiri atas etnis Jawa, Madura, Bajo, Luwu
- Mata pencaharian utama sebagai nelayan, Petani, Pembudidaya rumput laut, Pengusaha pariwisata (Guide, Homestay, Persewaan alat selam, Perahu wisata)



UPAYA PENGELOLAAN WISATA DI TN Karimunjawa

Secara umum menjaga potensi wisata melalui konsep 3P (Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan) yang terintegrasi satu sama lain

Secara khusus melalui upaya perwujudan pengembangan wisata berbasis masyarakat melalui upaya:



1. Penguatan kapasitas masyarakat

- Studi banding pemberdayaan masyarakat
- Pelatihan dan sertifikasi selam untuk masyarakat & staf
- Pelatihan intepreter
- Pelatihan pasca panen untuk souvenir
- Peningkatan usaha ekonomi yang menunjang ekowisata
- Pemasangan mouringbuoy bersama HPI
- Revisi zonasi yang menampung kegiatan wisata alam





2. Identifikasi dan pengembangan objek wisata bahari

- Identifikasi ODTWA di TNKJ
- Identifikasi bangkai kapal tenggelam/ wreck dive site di TNKJ
- Identifikasi Peninggalan Bawah Air (Oleh Direktorat Pengembangan Bawah Air Kepmenbudpar sejak 2009-2010)
- Pembangunan trekking mangrove



3. Perencanaan & penyediaan sarpras penunjang objek wisata bahari

- Master plan wisata TNKJ(2010)
- Rencana tapak & desain arsitektur wisata alam (2011)
- Pemasangan mooring buoy untuk dive site (2010)
- Pengembangan infrastruktur (2011) dirinci shelter, papan informasi, tracking.
- Pembangunan tracking mangrove tahap II (2011)

PROGRAM PENGEMBANGAN TN KARIMUNJAWA

1. Pembangunan sarana wisata alam seperti, tracking mangrove, muringbuoy untuk dive-spot, shelter, camping ground, toilet, menara pandang, dll.
2. Pengembangan pusat penetasan semi alami penyu dan pusat rehabilitasi lumba-lumba.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan melalui SPKP Agrosilvopastur, Peningkatan Usaha Ekonomi masyarakat, Model Desa Konservasi, dan Masyarakat Mitra Polhut.
4. Pengelolaan kawasan berbasis resort.
5. Pemantapan kawasan melalui penandaan batas kawasan dan batas zonasi.

Lessons Learned dari Pengelolaan Ekowisata di TN Karimunjawa

1. Pengelolaan Ekowisata tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat sekitar kawasan sebagai alternatif sumber penghasilan masyarakat guna mengurangi tekanan/eksploitasi sumber daya alam
2. Konservasi memiliki nilai yang sangat penting dalam mempertahankan nilai objek ekowisata, terutama sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
3. Masyarakat telah menyadari bahwa kegiatan ekowisata dapat menjadi mata pencaharian utama
4. Kegiatan ekowisata bisa mendorong suatu kawasan tertinggal menjadi daerah yang berkembang pesat dan tidak terisolasi lagi.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor

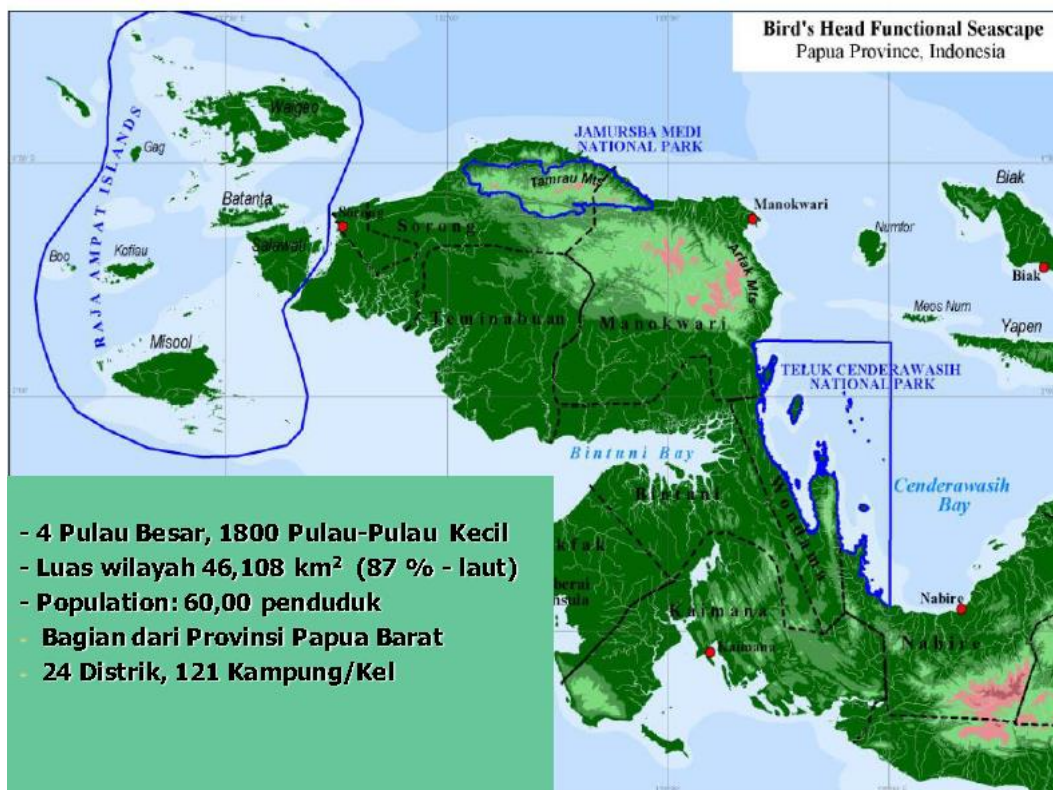
Saran dan Rekomendasi

1. Instansi terkait dapat turut membangun fasilitas penunjang kegiatan ekowisata, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, ketersediaan listrik, sarana transportasi laut dan telekomunikasi.
2. Pengusaha di sekitar kawasan dapat menjalankan skema CSR (corporate social responsibility) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
3. Pendampingan masyarakat dalam mengembangkan peran sertanya dapat dilakukan semua pihak.
4. Perlunya kajian dan penelitian guna menyediakan data pendukung dan alternatif pengembangan kegiatan ekowisata.
5. Pembangunan jalan, bandara, areal perdagangan dan sarana prasarana penunjang ekowisata lainnya sesuai tupoksi instansi terkait.

Dukungan yang Diharapkan dari Kemenpar & Ekonomi Kreatif

1. Komitmen bersama untuk melakukan kegiatan **EKOWISATA** di TNKJ sehingga indikator keberhasilan kegiatannya bukan dari banyaknya jumlah wisatawan.
2. Kesiapan & peningkatan budaya masyarakat melalui program **pendampingan dan pelatihan**.
3. Melakukan **standarisasi homestay**, kenyamanan, pelayanan dan bantuan perbaikan homestay.
4. **Sertifikasi interpreter** dan pembinaan HPI oleh dinas terkait di tingkat kabupaten dan propinsi.
5. Pembangunan **sarana pendukung obyek wisata alam** sesuai dengan masterplan pengembangan wisata alam TNKJ serta rencana tapak

Pertemuan 11



Potensi Wisata Bahari :

- Karang Keras : 553 jenis (70 %)
- Ikan Karang : 1,427 jenis
- Kerang-kerangan : 699 jenis
- Ikan Endemik : 15 jenis
- Paus dan Lumba-lumba, 15 jenis
- Duyung : 1 jenis
- Penyu : 5 jenis
- Berbagai jenis Pari (Manta)
- Berbagai jenis Hiu unik :



Wisata Sejarah, Seni dan Budaya :

- Raja Ampat memiliki banyak kekayaan sejahatah dan budaya:
 - Sejarah peninggalan perang Dunia II
 - Gua-gua jaman purba
 - Manusia perahu (Kajang)
 - Kearifan Lokal (Sasi) dlm mengelola alam
 - Berbagai jenis tari dan lagu daerah



Wisata Bahari Lainnya :

Kayaking :

Ribuan pulau kecil, atoll, selat, teluk dan laguna, Struktur Geologi yang mempesona, seperti di Kep. Wayag, Teluk Kabui, Perairan Misool selatan, Pulau Panemu

Sport Fishing :

Tangkap dan Lepas

Ikan Target :

Marlin/Layar

Bubara

Tenggiri

Tuna, Cakalang, dll



Aksesibilitas :

Angkutan Udara :

- Merpati Nusantara, Express Air, Batavia Air, Sriwijaya Air, Wings/ Lion Air
- Charter Flight: Susi Air, Pelita Air Service, Travira, Air Fast
- Rute Utama : Jakarta-Makasar-Sorong, Manado-Sorong, Ambon-Sorong, Jayapura-Manokwari-Sorong
- Tahap Pembangunan Bandara Waisai

Angkutan Laut :

- KM Marina Expres
- KM Getsemani
- KM Fajar Indah
- KM Fajar Mulia
- KM Ave Maria
- KM. Raja Ampat 1 & 3
- Charter Boat / Speed Boat
- Pembangunan Jetty Khusus Pariwisata

Sarana Akomodasi



Data Kunjungan Wisatawan Selam



Sebaran Wisatawan



Tim Pengelola Tarif Masuk Wisata Raja Ampat

- Tim Kolaborasi : Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, Masyarakat
- Dana Turis Asing Rp. 500.000/thn, Domestik Rp. 250.000/thn
- Pemanfaatan : Dana PAD, Konservasi, Pemberdayaan, Management Tim
- Pengembangan System On-Line pada tahun 2012
- Pos Penjualan : Waisai, Sorong, dan Bali
- Database pengembangan pariwisata

Peraturan Selam Rekreasi

- Pertama di Indonesia
- Hasil Kesepakatan bersama antar semua operator, LSM, Masyarakat, dan Pemerintah Daerah
- Pengaturan tata penyelaman
- Pengaturan Pengembangan Resort, Hotel, Penginapan, dan Kapal Wisata
- Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Laut
- Pengaturan Tenaga Kerja Selam

Pendaftaran Usaha

- Menerapkan tata cara pendaftaran usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
- BEBAS BIAYA
- Mudah dan Cepat
- System On-Line Pendaftaran Usaha Pariwisata
- Pengaturan Kapal Wisata (LiveAboard) melalui System Tag Kapal Wisata

Pengembangan Kampung Wisata

- Percontohan di 5 Kampung (Arborek, Sawinggrai, Yenwaupnur, Yenbuba, Sauwandarek)
- Dimulai Tahun 2009
- Tahun 2010, dikembangkan di 4 Kampung di Misool
- Tahun 2010, Mendapatkan dukungan PNPM Mandiri Pariwisata untuk 6 Kampung
- Paket Wisata : Snorkeling, Wisata Burung, Feeding Fish, Mancing, Wisata

KKLD

- Perda No 27 Tahun 2008
- Ada 6 KKLD : Selat Dampier, Kawe-Wayag, Teluk Mayalibit, Ayau-Asia, Kofiau, dan Misool Timur Selatan
- Luasan : 1.1 Juta Ha
- Perlindungan Potensi Kelautan
- Pengembangan Budaya "SASI"



10 Wisata Terbaik

- Diving dan Snorkeling
- Sport Fishing
- Kayaking
- Bird Watching
- Landscape Pulau
- Wisata Hutan (Flora dan Fauna Hutan)
- Gua Gua Purba
- Feeding Fish
- Proses Budidaya Mutiara

10 Destinasi Terbaik

- Pulau Mansuar
- Pulau Wayag
- Pulau Panemu
- Pulau Daram
- Teluk Kabui
- Teluk Mayalibit
- Hidden Bay
- Goa Tomolol
- Pulau Pef
- Pulau Batanta Utara

**Kep. Wayag
Waigeo Barat**



Kabui



Peluang Pengembangan :

1. Visi dan Misi Kabupaten Raja Ampat : Kabupaten Bahari yang didukung oleh Sektor Kelautan dan Pariwisata
2. Renstra Kementrian Budpar 2010 – 2014 : Raja Ampat salah satu dr 29 Destinasi utama
3. Potensi Wisata Bahari Raja Ampat sudah sangat dikenal Dunia
4. Memiliki Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dengan luas lebih dari 1 Juta Ha

Tantangan :

1. Pengembangan Aksesibilitas : Bandara Waisai, Transportasi Laut ke dan dari Objek wisata, Dermaga Laut, Kapal Laut, Penerbangan.....
2. Pengembangan Infrastruktur : Hotel, Restoran, Listrik, Air, Telekomunikasi, Lembaga Keuangan, Biro Perjalanan, dll
3. Diversifikasi Produk Wisata : Diving, Wisata Bahari lainnya, Seni Sejarah dan Budaya, Kuliner, Wisata Hutan, Burung, dan **Geopark**
4. Pemberdayaan Masyarakat : Pengembangan Kampung Wisata, SDM, Sapta pesona,

5. Ancaman Kerusakan SDA : Alam dan Ulah Manusia (Illegal Fishing, Illegal Logging, dll)
6. Investasi Pariwisata : Kemudahan dan Keringanan berusaha khususnya sektor pariwisata,
7. Pengembangan Teknologi Informasi dalam Promosi Pariwisata

PPK Terdepan di Raja Ampat

- Raja Ampat, pulau terdepan P. Fani
- Terdapat 3 gugusan pulau : Fani, Igi, Miarin
- Survey dari Kementrian Kelautan dan Perikanan : Potensi 3 Pulau tersebut sangat luar biasa
- Merupakan tempat persinggahan nelayan Philipina
- Saat ini terdapat Pos Marinir : 30 orang

- Rep. Palau, negara kecil dengan potensi wisata klas dunia
- Destinasi wisata selam
- Perlu Kerja-sama pengembangan pariwisata antar negara, Palau dan Indonesia
- Pengembangan wisata eksklusif

Pertemuan 12



- NKRI SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN BERCIRI NUSANTARA, YG TERDIRI DR 17.408 PULAU DAN BERBATASAN DGN 10 NEGARATETANGGA.
- DLM MENJAGA KEUTUHAN NKRI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY PERLU DILAKUKAN PENGELOLAAN PPKT DGN MEMPERHATIKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, HUKUM, SDM DAN HANKAM.
- PPKT ADALAH PULAU2 YG MEMPUNYAI NILAI STRATEGIS SBG TITIK DASAR (TD) DR GRS PANGKAL KEPULAUAN INDO DLM PENETAPAN WILAYAH PERAIRAN INDO,ZEE DAN LANDAS KONTINEN.
- PULAU KECIL ADALAH PULAU DENGAN LUAS LEBIH KECIL ATAU SAMA DENGAN 2000 KM² BESERTAKESATUAN EKOSISTEMNYA.
- PPKT MERUPAKAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT) ADALAH KAWASAN YG TERKAIT DGN KEDAULATAN NEGARA, PENGENDALIAN LINGKUNGAN, DAN/ATAU SITUS WARISAN DUNIA YG PENEKEMBANGANNYADIPRIORITASKAN BAGIKEPENTINGAN NASIONAL.

DASAR/LANDASAN HUKUM

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 3/2002 TTG PERTAHANAN NEGARA
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 2/2002 TTG KEPOLISIAN
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 34/2004 TTG TNI
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 /2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.
5. UNDANG-UNDANG NOMOR 43 / 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA.
6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 /2010 TENTANG PEMANFAATAN PPKT.
7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 /2005 TENTANG PPKT.

KONDISI BATAS NEGARA WILAYAH DARAT & MASALAH

RI – Malaysia

Penegasan batas RI – Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1975 – 2004, telah menghasilkan:

- Segmen yg blm selesai masih menyisakan 10 OBP
- Panjang garis batas \pm 2004 km Kaltim: 1.038 km, Kalbar : 966 km
- Tugu batas (type A,B,C,D) sebanyak 19.328 buah lengkap dengan koordinat
- Peta berupa Field Plan dan Traverse H-Plan (skala 1:5000 dan 1:2500) masing-masing 1.318 MLP
- Pos Pamtas : 56 pos di Kalbar, 41 pos di Kaltim
- Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat PLB Darat (PLBD).

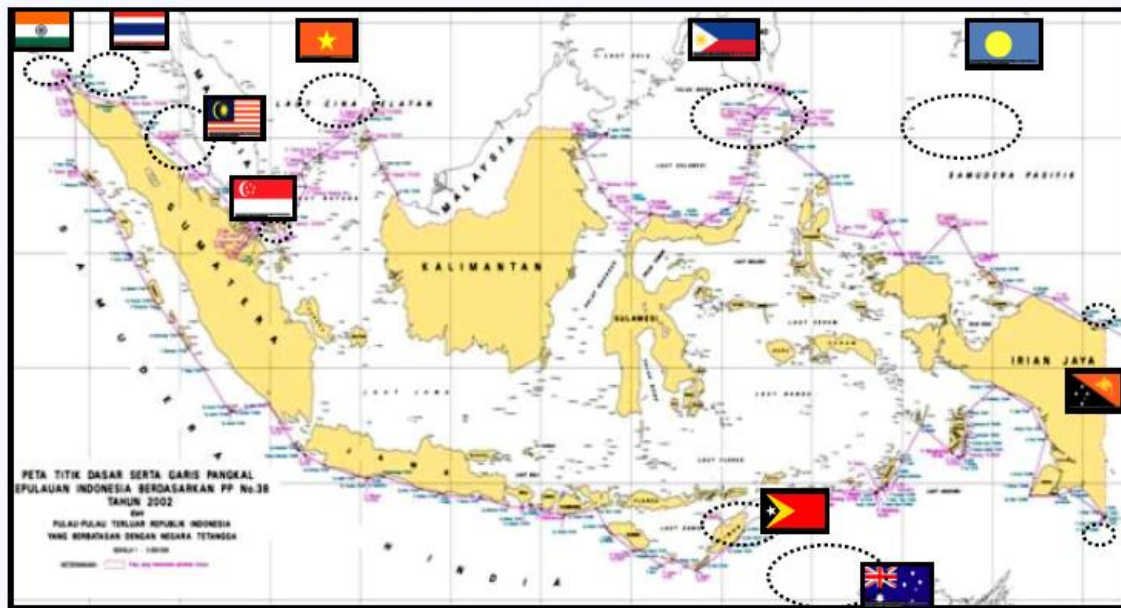
RI – Republik Demokratik Timor Leste

- Segmen yg blm selesai 3 unresolved & unsurvey .
- Panjang garis batas RI – RDTL, Sektor Barat 149.1 Km dan Sektor Timur 199.7 Km dengan deliniasi sudah mencapai 93%.
- Demarkasi di Sektor Timur mencapai 42 titik dan Sektor Barat 8 titik.
- Pos Pamtas 51 pos di NTT
- Untuk memfasilitasi lintas batas terdapat 9 PLBD di NTT

RI – Papua Nugini

- Panjang garis batas RI – PNG \pm 760 Km.
- Sejak tahun 1966 telah dibangun demarkasi 55 tugu utama (MM) dan tugu perapatan sebanyak 1792 buah.
- Masih terdapat masalah ketidak pastian demarkasi tentang 14 MM pada koordinat yang disepakati.
- Pos Pamtas sebanyak 86 pos
- Untuk memfasilitasi lintas batas trdapat 14 PLBD di Papua.

PERBATASAN MARITIM RI – NEGARA TETANGGA

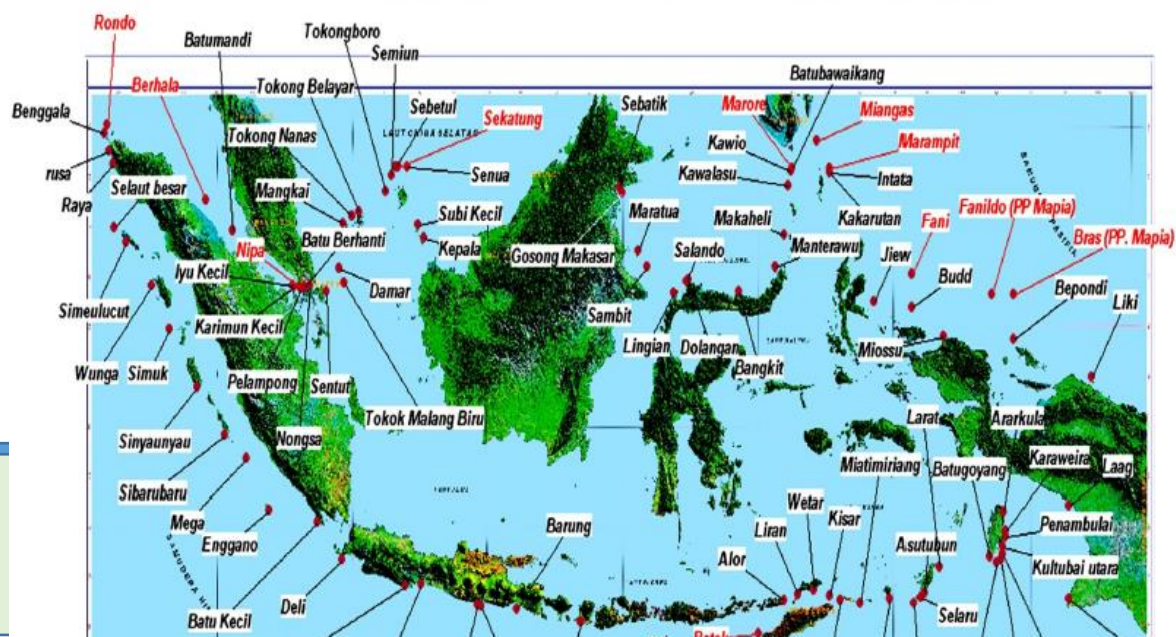


KONDISI BATAS MARITIM DENGAN NEGARA TETANGGA

No	PERBATASAN	PERMASALAHAN
1.	RI-INDIA	- Batas ZEE dikawasan ini belum ditentukan sehingga membuka peluang terjadinya <i>illegal fishing</i> .
2.	RI - THAILAND	- Batas ZEE dikawasan ini belum ditentukan sehingga membuka peluang terjadinya <i>illegal fishing</i> .
3.	RI-MALAYSIA	<p>a. Batas Landas Kontinen ini diratifikasi oleh Malaysia sebagai garis batas ZEE, dengan demikian tampaknya Malaysia beranggapan garis batas ZEE sudah selesai.</p> <p>b. Pemerintah RI menghendaki garis batas Landas Kontinen tidak segaris dengan ZEE (berdasarkan <i>UNCL OS 1982</i>).</p> <p>c. Di Selat Malaka disepakati 8 titik koordinat garis batas laut wilayah RI dengan Malaysia, yang disetujui tanggal 17 Maret 1970.</p> <p>d. Pemerintah RI telah meratifikasi perjanjian ini dengan UU RI No. 7 Th. 1971, tanggal 10 Maret 1971.</p> <p>e. Pada garis batas laut daerah <i>enclave area</i> berstatus sebagai perairan bebas.</p> <p>f. Kedua negara masih dalam proses perundingan.</p>
4.	RI-SINGAPURA	- Batas laut teritorial segmen timur selat Singapura belum selesai masih dlm proses perundingan.

No	PERBATASAN	PERMASALAHAN
6.	RI-FILIPINA	<p>a. Pemerintah RI menetapkan bahwa garis batas maritim menggunakan prinsip proporsionalitas (<i>proportionality principle</i>).</p> <p>b. Filipina menggunakan prinsip <i>Traktat of Paris 1896</i> yang menggunakan prinsip <i>creative option</i> yang memungkinkan <i>enclaving</i> terhadap P. Miangas.</p> <p>c. Belum ada kesamaan tehnik penentuan garis batas maritim.</p>
7.	RI - PALAU	<p>- Republik Palau terdiri dari beberapa pulau yang memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan laut teritorialnya sampai 200 mil. Apabila Rep. Palau menarik garis zona perikanan yang diperluas 200 mil sesuai Rezim ZEE maka akan tumpang tindih dengan ZEE RI, maka perlu diadakan perundingan secepatnya untuk menentukan batas ZEE.</p>
8.	RI - PNG	<p>- Sampai saat ini belum ada masalah yang timbul karena batas maritim.</p>
9.	RI - RDTL	<p>- Batas maritim antara RI - RDTL belum adanya perjanjian bilateral dan belum selesainya batas darat.</p>
10.	RI - AUSTRALIA	<p>- Banyak pelanggaran perbatasan maritim karena nelayan tradisional tidak dilengkapi dengan sarana navigasi pelayaran.</p>

DISLOKASI PULAU PULAU TERLUAR WILAYAH INDONESIA



12 PULAU TERLUAR RAWAN KONFLIK



ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH DARAT

Aspek Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. Minimnya Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas (PLB).
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pos Pamtas.
3. Maraknya Pelintas Batas Traditional Illegal.

ISU STRATEGIS PENGELOLAAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT

Aspek Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. Kurang Optimalnya Penegakan Kedaulatan di Laut.
2. Tingginya Kejahatan Transnasional Berdimensi Maritim

3. Masih Maraknya Aktivitas IUU-Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing).

permasalahan pulau-pulau kecil terluar

1. pulau-pulau di indonesia belum terlindungi secara hukum, karena sampai saat ini belum ada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah ri tentang pulau (meliputi jumlah pulau, nama pulau, posisi pulau, dan lain-lain) pada saat ini yang dimiliki indonesia adalah p.p no.38 tahun 2002 yang direvisi dengan p.p no. 37 tahun 2008 tentang koordinat geografis titik dasar indonesia, p.p tersebut mengenai tentang titik dasar dan bukan p.p tentang pulau.
2. belum dilaporkannya secara resmi oleh pemerintah ri tentang pulau di indonesia (meliputi jumlah, nama, dan lain-lain) kepada perserikatan bangsa-bangsa (pbb) dalam hal ini united nations group of expert on geographical names (ungegn), sesuai dengan ketentuan unclos 1982 dan masih simpang siurnya data jumlah dan nama pulau.
3. pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau-pulau kecil yang letaknya terpencil dan sebagian besar tidak berpenduduk. meskipun bersifat strategis, keadaan ini menjadikan pulau-pulau tersebut kurang mendapatkan perhatian serta pengelolaan yang semestinya. pulau-pulau terluar indonesia digunakan sebagai titik terluar untuk mengklaim wilayah maritim republik indonesia. apabila kehilangan 1 (satu) buah pulau kecil seperti ini dapat berimplikasi terhadap kehilangan wilayah yang luas dari perairan di perbatasan.
4. pulau-pulau kecil terluar sering kali dijadikan tempat persinggahan oleh para nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah zee (zona ekonomi eksklusif) indonesia dengan alasan berlindung dari cuaca buruk dan sbg wilayah transit perdagangan ilegal (penyelundupan narkoba,).
5. p.pkt ini juga rawan terhadap abrasi, karena ombak yang sangat besar dari laut sekitarnya.
6. belum dibuat perpres tentang rtrw p.pkt.

LANGKAH 2 PENGAMANAN KAW. PERBATASAN DAN PPKT

PEMBUATAN DAN PENEMPATAN TUGU/PRASASTI & SUAR DI WILTAS DAN PPKT

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

TNI AD :

PERBATASAN DARAT KALIMANTAN OLEH KODAM XII/ TPR DAN KODAM VI/MLW

PERBATASAN DARAT PAPUA OLEH KODAM XVII/CEN

PERBATASAN DARAT NTT OLEH KODAM IX/UDY

12 PULAU – PULAU KECIL TERLUAR (PPKT) OLEH PAMTAS TNI TERDIRI

DARI:

P.RONDO (1 KIE MAR), P.BERHALA (1 KIE MAR), P.NIPA (1 KIE MAR),

P.SEKATUNG (1 KIE MAR), P.MIANGAS, MARORE DAN BATEK (1 KIE TNI AD),

P.MARAMPIT (1 KIE MAR), P.FANI, FANILDO DAN BRAS (1 KIE MAR). P.DANA (1KIE MAR).

KHUSUS DI WIL PERBATASAN LAUT; TNI AL MENGGELAR PATROLI DI PER. PERBATASAN SEPANJANG TAHUN DAN POS TNI AL

PPKT YG BERPENDUDUK OLEH POLRI DLM RANGKA KAMTIBMAS

PERAN MASYARAKAT LOKAL DAN PEMDA PERSPEKTIF HANKAM

- IDENTIFIKASI MASALAH PPKT
- MEMBERIKAN INFO (DETEKSI DINI) ADANYA GIAT ILEGAL DI WIL PERBATASAN DAN PPKT.
- MEMBERIKAN MASUKAN /USULAN TERHADAP RENC PEMANFAATAN ATAU GELAR POS TNI DAN POLRI DI WIL PPKT.
- TURUT SERTA MENJAGA, MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN POS PENGAMANAN TNI DAN POLRI DI WIL PPKT.
- MELAPORKAN ADANYA KERUSAKAN PPKT YG MERUGIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

PILOT PROJECT PPKT

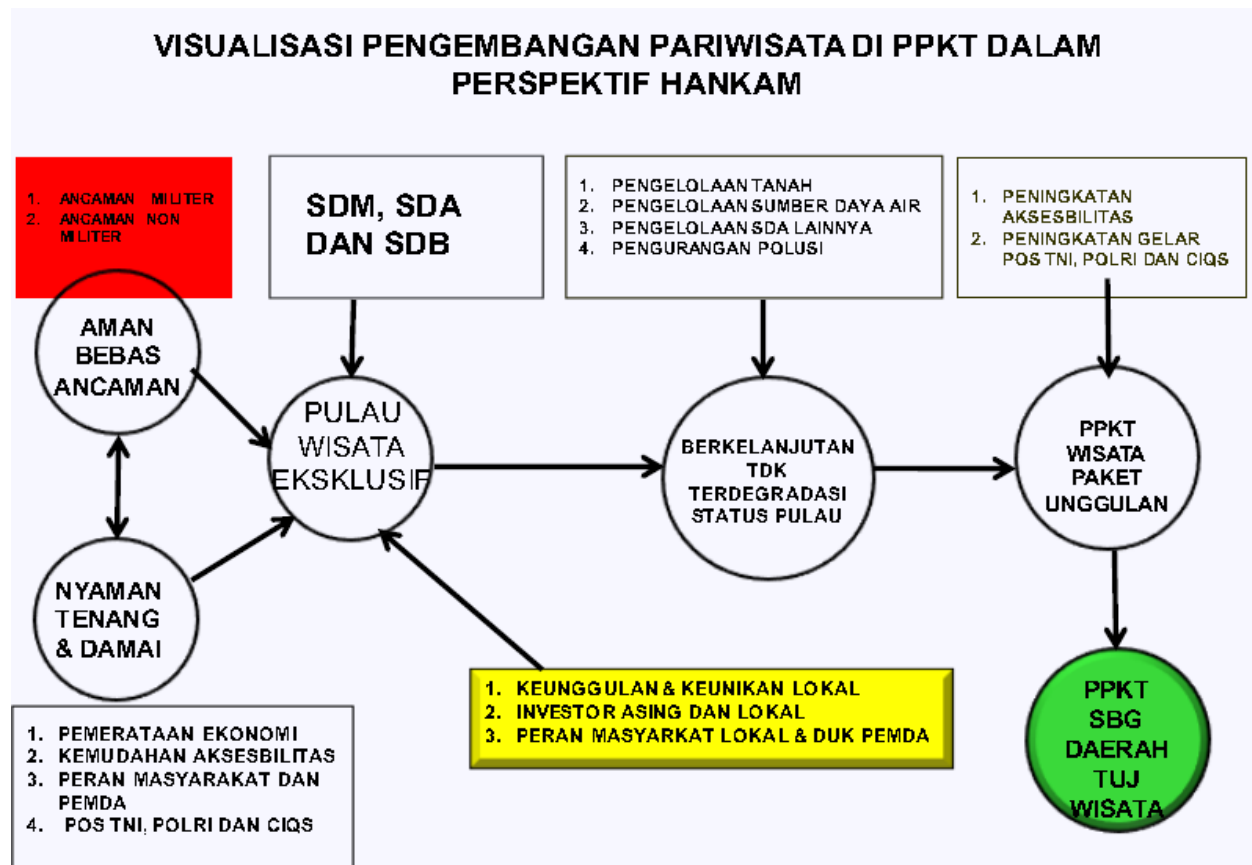
(Hasil Rapat Paripurna Tingkat Menteri/RPTM) Tanggal, 16 Desember 2009 di Kemenko Polhukam

1. P. NIPA (Prov.Kepri)

Sebagai pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan Kawasan Ekonomi. Kendala: Hak Pakai utk Kawasan Ekonomi

2. P. BERHALA (Prov.Sumut)

Sebagai pengembangan kawasan ekowisata bahari. Kendala: Minim aksesibilitas (dr Bedagai, P. Sumatra – P.Berhala)



REKOMENDASI PENGELOLAAN PPKT

1. PERLU INPRES TTG PENGATURAN UNTUK INVESTOR ASING DALAM RANGKA MENGELOLA PPKT SBG KAWASAN WISATA BAHARI.
2. MENYELESAIKAN PERCEPATAN SEGMENT BATAS YG BELUM SELESAI DI WIL PERBATASAN NEGARA.

3. MELAKUKAN PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBINAAN MASYARAKAT DI PULAU – PULAU KECIL TERLUAR.
4. PERLUNYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK DIWILAYAH PERBATASAN ANTARA LAIN DENGAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN DI DAERAH PERBATASAN DAN PPKT.
5. MELAKSANAKAN SURVEI HIDRO-OSEANOGRAFI LENGKAP YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR BAGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PPKT SBG KAWASAN WISATA.
6. MELAKUKAN PEMELIHARAAN TERHADAP SARANA YANG DIBANGUN DI PPKT SEPERTI
 1. SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP) DAN TITIK REFERENSI SBG DAERAH TUJUAN WISATA.
7. PERLUNYA PEMERINTAH MENYIAPKAN DUKUNGAN SARANA POS-POS PAMTAS TNI DI KAW PERBATASAN DAN PPKT (MISAL: SARANA DAN PRASARANA, AIR, SARANA PATROLI DAN ALKOM).
8. PERCEPATAN PERPRES TENTANG RTRW PPKT

Pertemuan 13

Ekowisata

PENGERTIAN

- Menurut Lindberg (1991) **ekowisata** adalah perjalanan ke kawasan yang masih asli, yang relatif tidak terusik ataupun tercemari dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan alam, hidupan liar tumbuhan dan satwa, serta budaya setempat.
- Western (1995) menekankan bahwa **ekowisata** adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke wilayah-wilayah alami yang melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. Dengan kata lain ekowisata menggabungkan suatu komitmen terhadap alam dengan tanggung jawab sosial.

Ekowisata (*ecotourism*) :

- perjalanan yang bertanggungjawab
- ke kawasan yang masih asli,
- untuk mempelajari, mengagumi, menikmati keindahan alam, hidupan liar, keanekaragaman hayati, sejarah, dan budaya setempat
- apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan (berperilaku ramah lingkungan),
- dampak lh sekecil mungkin
- kesempatan ekonomi bagi penduduk setempat.

☒ **Ekowisata** menggabungkan suatu komitmen thd alam dg tanggung jawab sosial.

☒ **Ekowisata** mengandung unsur :

- penghargaan (*rewarding*),
- pengkayaan (*enriching*).
- petualangan (*adventuresome*),
- proses belajar (*learning*) yang terkait dg obyek ekowisata yg dikunjungi.

Pariwisata adalah segala sesuatu yg berhubungan dg wisata (kegiatan perjalanan atau sebagian dr kegiatan tsb yg dilakukan scr sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati.

obyek & daya tarik wisata) termasuk perusahaan obyek & daya tarik wisata & usaha- usaha yg terkait di bidang tsb (UU RI no. 9 th 1990 tt Kepariwisataan)

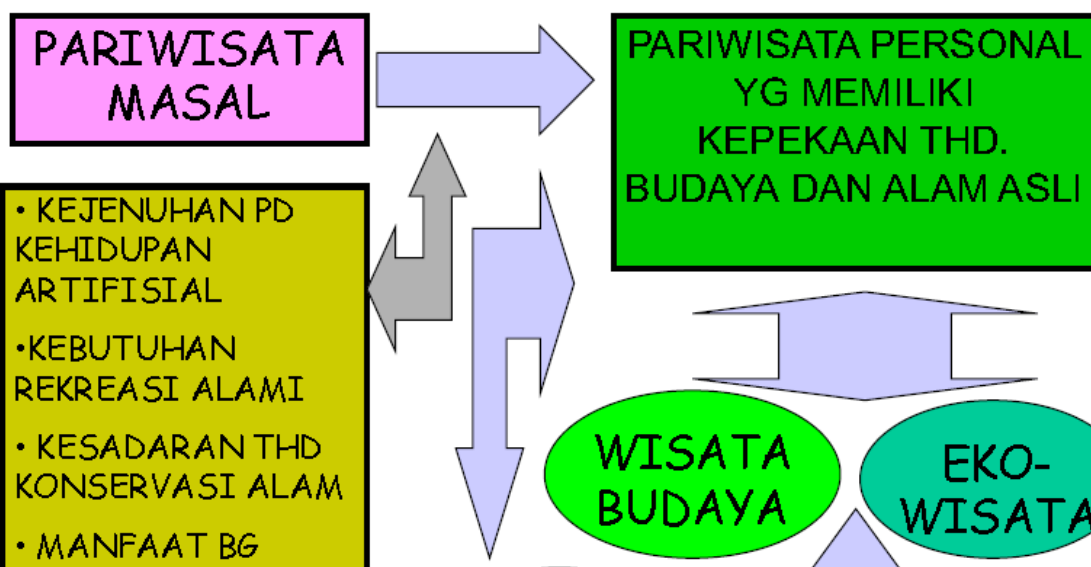
- Kegiatan pariwisata sangat erat kaitannya dg keinginan manusia untuk rekreasi.
- **Rekreasi** berasal dari kata *to recreate* yang artinya mencipta kembali.
- **Rekreasi** berarti mengerjakan sesuatu perbuatan atau aktifitas yang menyegarkan tubuh, membangun minat, dan menciptakan kembali kesegaran pikiran dan perasaan.

EKOWISATA MENJAWAB

- Kejenuhan manusia akan situasi yg serba artifisial sebagai produk samping kehidupan modern
- Kebutuhan manusia akan rekreasi yg alami dan budaya asli setempat
- Peningkatan kesadaran terhadap konservasi alam
- Kesadaran thd keterbatasan daya dukung
- Timbulnya kecenderungan pd “budaya hijau”
- Kesadaran bahwa penduduk lokal harus mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan kawasan konservasi atau obyek ekowisata
- Kesadaran ini didukung oleh komitmen politik dengan lahirnya Deklarasi Rio dan Agenda 21

yg

antara lain merekomendasikan kegiatan ekowisata



EKOWISATAWAN

(1). *Hard core ecotourist*

- melakukan perjalanan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat khusus seperti para pengamat burung dan peneliti kupu-kupu.
- Ingin menghayati lingkungan alam yg masih murni,
- tidak begitu mementingkan prasarana,
- biasanya bersedia membayar banyak

(2). *Mainstream ecotourist*

- Senang menjelajah hutan belantara, berarung jeram, menyelam dan alam asli
- Cukup puas tinggal di rumahrumah penduduk atau pondokpondok sederhana.
- Kesediaan besar untuk mengeluarkan biaya
- Bersedia membayar ratusan ribu rupiah per hari untuk melakukan kegiatan selam.
- Di Rwanda, para pengunjung bersedia mengeluarkan biaya besar untuk mengamati gorilla

(3). *Casual ecotourist*

- Fokus utamanya bukan wisata alami (kunjungan ke Bali atau Yogyakarta)
- Tetapi juga senang mengunjungi wisata alami seperti orang utan di Bohorok atau matahari terbit di Bromo Tengger
- Mengharapkan prasarana yang baik
- kurang bersedia mengeluarkan biaya besar

(4). *Recreation ecotourist*

- Senang mengunjungi alam - taman nasional/ hutan wisata
- tujuan untuk berekreasi drpd mengagumi alam.
- mengharapkan prasarana yang cukup baik.
- Kurang bersedia mengeluarkan biaya yang besar

SISTEM PARIWISATA & EKOWISATA

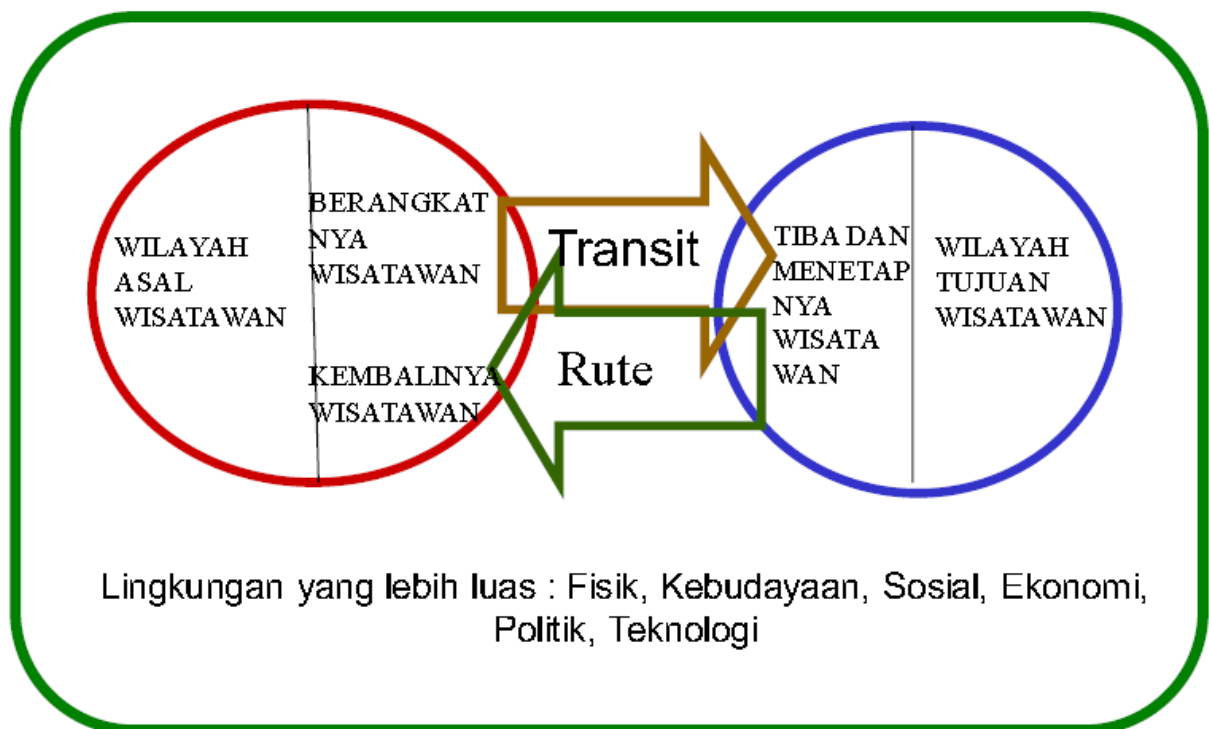
Komponen Pariwisata & Ekowisata

(1). Komponen pariwisata & ekowisata dalam bentuk paling sederhana

- asal - tempat tinggal wisatawan;
- perjalanan - sarana ke tempat tujuan & kembali
- tempat tujuan - tempat yg dikunjungi wisatawan

(2). Komponen pariwisata & ekowisata dari sudut pandang ekonomi

- permintaan
- jarak
- penawaran / suplai



Sistem kepariwisataan (Wall, 1995)

- Ekowisata merupakan wujud pembangunan berkelanjutan dalam wisata alam dimana aspek lingkungan, sosial dan ekonomi mendapatkan perhatian yang proporsional

- Ekowisata mendukung konservasi alam :

(1). PERLINDUNGAN THD BERLANGSUNGNYA PROSES-PROSES EKOLOGIS DAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN SPT PERLINDUNGAN SIKLUS AIR, UDARA, RANTAI MAKANAN, SISTEM HIDROLOGIS DSB.

(2). PENGAWETAN SDA DAN KEANEKARAGAMAN SUMBER PLASMA NUTFAH, SPT PENGAWETAN TANAH, AIR, FLORA, FAUNA DSB.

(3). PEMANFAATAN SCR LESTARI SDA & LINGK-NYA

Lanjutan peranan ekowisata

- Ekowisata dapat mendukung pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan di sekitar obyek wisata.

- Umpan baliknya - peningkatan dukungan penduduk thd program-program Konservasi (Lewis, Koweche, dan Mwenya, 1990).

- Bila dikelola dg baik ekowisata dapat merupakan sumber pemasukan devisa

- Sumber pendapatan PEMDA

- Multiplayer effect berbagai sektor usaha baik transportasi, industri kerajinan, hotel, restoran dsb.

PRODUK PARIWISATA

☒ Produk pariwisata sebagai suatu industry adalah pengalaman Wall (1995)

☒ 5 Fase Pengalaman

- *pertama* adalah antisipasi;
- *kedua* adalah perjalanan ke daerah tujuan;
- *ketiga* pengalaman di daerah tujuan;
- *keempat* adalah perjalanan pulang;
- *kelima* adalah mengenang kembali.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi daya dukung wisata adalah

- (1) factor lingkungan;
- (2) faktor sosial;
- (3) factor managerial. (WTO dan UNEP, 1992).

PERMINTAAN DAN SUPLAI

Tinjauan pariwisata dari sisi permintaan (*demand side*)

- Berdasarkan ciri-ciri wisatawan, maka sifat-sifat pariwisata menyangkut kriteria:
- **(1). kendala ruang**
- **(2). kendala temporer**
- **(3). Motivasi**
- **(4). Sarana transportasi**
- **(5). Preferensi –**

Tinjauan pariwisata dr sisi suplai :

- (1). **ciri-ciri bisnis** yang melayani kebutuhan wisatawan
- (2) Badan-badan pemerintah yang mengatur dan mengembangkan pariwisata di tingkat internasional, nasional, provinsi dan lokal
- (3) Melibatkan berbagai pihak (individu, dan organisasi dalam banyak sektor, swasta, dan non pemerintah)
- (4) Terdapat persaingan dg sektor lain yg potensial dlm pemakaian sd tanah, Pengembangan suatu daerah yang memiliki potensi pariwisata (seperti keindahan alam, kekayaan budaya, maupun keunikan – keunikan lainnya menimbulkan daya tarik wisatawan),

KRITERIA KELAYAKAN KAWASAN EKOWISATA

(Gregesen ,1975) :

- **(1).Potensi sumberdaya alam kawasan** : kekhasan / keunikan, kelangkaan, *irreversibility* (ketidak-terpulihan), pertimbangan lingkungan dan potensi pengembangan
- **(2).Hubungannya dengan *supply deficits*** : letaknya terhadap pusat penduduk, fasilitas yang ada, obyek rekreasi lain yang dekat, luas daerah penduduk yang dilayani, hubungan biaya manfaat

- **(3). Kriteria kelembagaan** : kriteria pelaksana, tanggung jawab institusional, filosofi, penerimaan masyarakat, dan penerimaan politik

(4). Kriteria tambahan : penciptaan lapangan kerja, perlindungan kebakaran, dan kemungkinan pengembangan

- (5). Daya tarik wisata dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

- (a). **Lokasi**

- (b). **Sarana dan prasarana**

- (c). **Wisatawan**

- (d). **Partisipasi masyarakat**

- (e). **Kondisi politik, ekonomi dan keamanan** - sangat menentukan tujuan wisata terutama wisatawan mancanegara (Wall, 1995).

DAMPAK KEGIATAN WISATA

KWS & KEGIATAN EKOWISATA YG RENTAN A.L. :

- Kws tersebut mungkin sisa terakhir ekosistem yg semula luas dan mudah terganggu
- Kegiatan ekowisata sering mengarah pd komponen khusus ekosistem yang rentan spt pengamatan spesies langka, kws yg mempunyai geomorfologi yg unik tetapi mudah rusak
- Atraksi yg diinginkan terkait masa-masa yg peka spt musim satwa berpasangan, migrasi burung/ satwa lain, atau ketika saat satwa karnivor memburu mangsanya

PENUTUP

. **Ekowisata** menggabungkan suatu komitmen thd konservasi alam dg tanggung jawab sosial dan

pengembangan ekonomi

- Produk pariwisata / ekowisata sebagai suatu industry adalah pengalaman
- Daya dukung lingkungan pariwisata /ekowisata dinyatakan dalam jumlah pengunjung per satuan luas per satuan waktu. DD juga dapat dididekati a.l. dg penerapan batas-batas perubahan yg dapat diterima
- Kriteria kelayakan kawasan ekowisata meliputi potensi sumberdaya alam, hubungannya dengan *supplay deficit*, kriteria kelembagaan dan kriteria lainnya

- Dampak ekowisata meliputi tiga aspek : kegiatan yang menimbulkan dampak, ekosistem tempat terjadinya dampak, dan komponen lingkungan yg dipengaruhi

Pertemuan 14

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PESISIR BERBASIS MASYARAKAT

ISU PENGELOLAAN WILAYAH DAN

SUMBERDAYA PESISIR DAN PPK

- KONFLIK PEMANFAATAN RUANG DAN KEWENANGAN
- KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR (80% relatif miskin dengan tingkat pendidikan rendah)
- DEGRADASI KUALITAS LINGKUNGAN PESISIR

- 42% Terumbu Karang rusak berat, 29% rusak, 23% baik dan hanya 6% sangat baik

- 40% hutan mangrove telah rusak

- Berkurangnya stok sumberdaya ikan

- Pencemaran Laut & Pesisir

ISU PENGELOLAAN WILAYAH DAN

SUMBERDAYA PESISIR DAN PPK

- RAWAN BENCANA ALAM
 - Abrasi, Erosi pantai, tsunami dll
- SUMBERDAYA PPK BELUM DIKELOLA SECARA OPTIMAL

- PENGELOLAAN KONSERVASI LAUT BELUM OPTIMAL
- KETIDAKPASTIAN DAN KEKOSONGAN HUKUM
- SUMBERDAYA KELAUTAN NON KONVENSIONAL BELUM

DIKELOLA SECARA OPTIMAL

BATAS WILAYAH LAUT DENGAN NEGARA TETANGGA BELUM

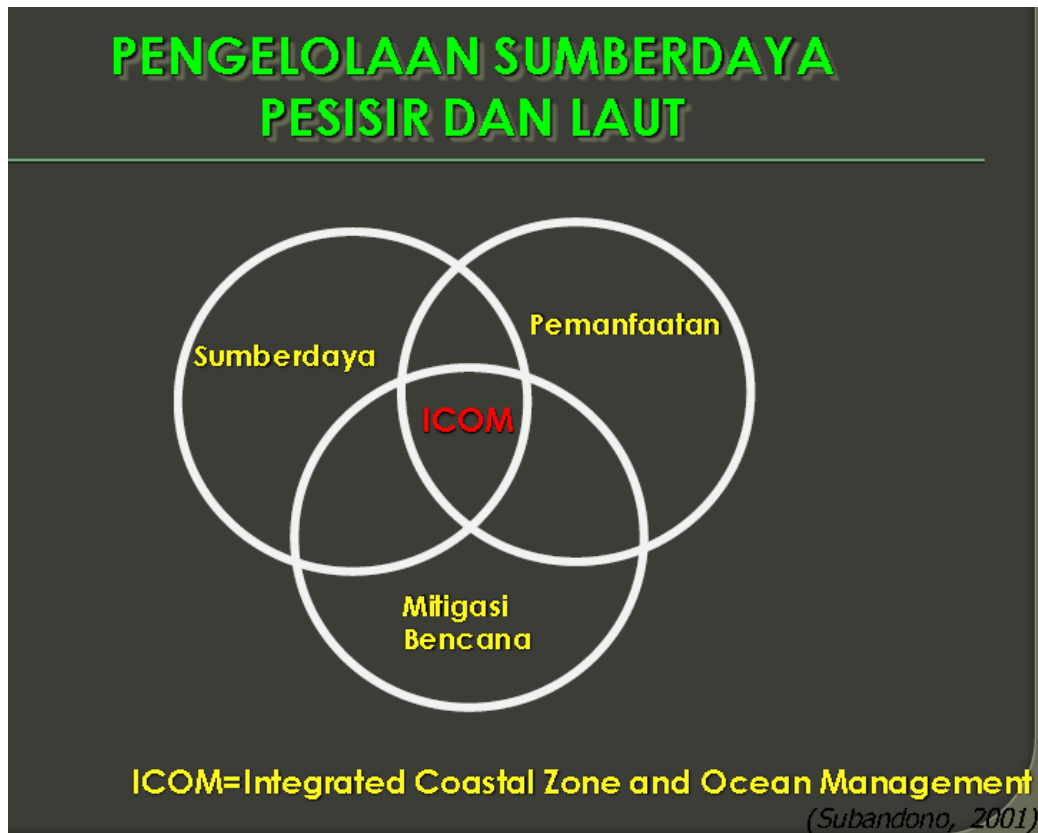
DISEPAKATI



Strategi Implementasi

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

- . Penataan Ruang
- . Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat
 - Penyiapan Peraturan Perundangan (RUU PWP)
 - MCRMP (Small Scalle Natural Resources Management)
 - Coremap II (Pengelolaan SD Terumbu Karang Berbasis Masyarakat)
- . Pendayagunaan Potensi Sumberdaya Kelautan Non- Konvensional
- . Pendayagunaan Potensi SD Kelautan Pesisir dan Pulaupulau Kecil
- . Pengelolaan Konservasi Laut
- . Pengembangan Kemitraan dgn Perguruan Tinggi dan Stakeholders lainnya



APLIKASI PEMBANGUNAN PESISIR DAN LAUT BERKELANJUTAN DALAM ICOM

KAJIDAH EKOLOGIS

- Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (renstra, zonasi, MP, AP)
- Pemanfaatan optimal
- Pengendalian pencemaran
- Rancangan ramah lingkungan

KAJIDAH SOSEKBUD

- Peningkatan kesejahteraan
- Pemerataan

Pembangunan untuk memenuhi saat ini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya

KAJIDAH SOSIAL POLITIK

- Sistem politik demokratis
- Sistem politik transparan
- Desentralisasi
- Pelibatan masyarakat

KAJIDAH HUKUM/KELEMBAGAAN

- Penerapan aturan
- Penanaman etika
- Sentuhan nilai keagamaan

Modul M
Perencan
Jurusan F

- Tujuan
- Cakupan kegiatan
- Tatahan pelaksanaan
- Manfaat
- dll

RENCANA AKSI

RENCANA PENGELOLAAN

- Rencana kerja
- Pengaturan koordinasi
- Paket terpadu kegiatan
- Public campaign

- Alokasi ruang
- Pemilihan



CIRI-CIRI RUU PWP

1. Pendekatan wilayah dan keutuhan NKRI

2. Penerapan norma wajib dan sukarela dalam pengelolaan wilayah pesisir
3. Multi sektor dan multi level pemerintahan
4. Pengakuan hak-hak masyarakat pesisir
5. Koordinatif, integratif & konsistensi
6. Penggunaan paradigma laut

FOKUS RUU PWP

1. Menata Pengelolaan Pesisir di Wilayah Perbatasan dalam rangka kedaulatan NKRI
2. Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu sukarela, wajib, serta akreditasi program
3. Norma Pengelolaan Pesisir Terpadu
4. Mekanisme keterpaduan dan konsistensi pembangunan pusat dan daerah

Manfaat UU PWP

Mensinergiskan pentaatan dan Penegakan berbagai UU yang terkait dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir

- . Mendorong kepastian berusaha dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- . Menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di wilayah pesisir dan mendorong peran pemda dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan
- . Memperkuat sistem kelembagaan yang mengelola, menyelesaikan masalah dan konflik di wilayah pesisir
- . Menjamin akses masyarakat pesisir untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir yang telah dikelola secara lestari



- **Tujuan Umum:**

Untuk menjamin ketersediaan ikan karang dan kelestarian ekosistem terumbu karang melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah; penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat.

- **Tujuan Khusus:**

